HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
16 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

MINGGU, 15 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

NASIONAL

Sufmi Dasco Didukung Partai Gema Bangsa Jadi Wapres RI, Dinilai Mampu Jaga Stabilitas Nasional

Oleh Redaksi · 15 Nov, 17.04 WIB



BANDA ACEH - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai mendapat dukungan untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) RI. Dasco santer dikabarkan layak sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor dua di republik ini.

Dukungan tersebut salah satunya datang dari DPP Partai Gema Bangsa. Partai Gema Bangsa menilai Dasco memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas Politik dan memperkuat persatuan nasional.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan mengatakan posisi Wakil Presiden membutuhkan sosok yang tidak hanya memiliki pengalaman politik. Tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah dinamika nasional.

Menurutnya, figur yang menduduki jabatan tersebut harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik sekaligus memastikan kesinambungan visi dan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam konteks tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad patut menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan secara serius dalam pembicaraan mengenai sosok Wakil Presiden," kata Sopiyan dalam keterangannya, Minggu (15/11).

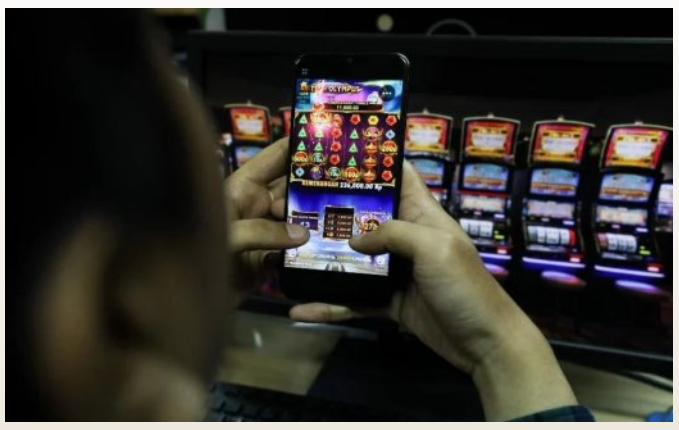
Sopiyan menilai, Dasco menjadi salah satu figur yang patut diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai calon pendamping Prabowo.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Siber Duga Dana Judi Online Bisa Biayai Operasi Penyadapan Presiden



JAKARTA — Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo menduga aliran dana judi online berpotensi berkaitan dengan pendanaan operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan teknologi pengawasan canggih seperti Pegasus.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Relawan Gibran Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya



BANDA ACEH - Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Kali ini, dukungan datang dari relawan Gibran Joeara (GI-JOE).

Ketua GI-JOE Benny Parapat mengatakan, pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto memilih Dasco sebagai calon wapres untuk diusulkan …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
LINGKUNGAN 12
Aneka Berita 14

INTERNASIONAL

Microsoft Bantah Gangguan Layanannya Picu Penghentian Penerbangan di AS, Ini Penjelasannya



AMERIKA SERIKAT – Microsoft membantah gangguan layanan teknologi yang dialaminya berkaitan dengan penghentian seluruh penerbangan keberangkatan di Amerika Serikat (AS) pada Jumat (13/11/2026).

Perusahaan teknologi tersebut menegaskan tidak menemukan indikasi hubungan antara gangguan sistemnya dan masalah pada pengendalian lalu lintas udara.

Selengkapnya di halaman 14 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia



BANDA ACEH - Ribuan massa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menyerukan agar sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI merupakan figur yang mampu mengayomi seluruh komponen bangsa dan tidak bersikap Islamofobia.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

21 BERITA

NASIONAL

Sufmi Dasco Didukung Partai Gema Bangsa Jadi Wapres RI, Dinilai Mampu Jaga Stabilitas Nasional

Oleh Redaksi · 15 Nov, 17.04 WIB



BANDA ACEH - Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai mendapat dukungan untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) RI. Dasco santer dikabarkan layak sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor dua di republik ini.

Dukungan tersebut salah satunya datang dari DPP Partai Gema Bangsa. Partai Gema Bangsa menilai Dasco memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas Politik dan memperkuat persatuan nasional.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan mengatakan posisi Wakil Presiden membutuhkan sosok yang tidak hanya memiliki pengalaman politik. Tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah dinamika nasional.

Menurutnya, figur yang menduduki jabatan tersebut harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik sekaligus memastikan kesinambungan visi dan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam konteks tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad patut menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan secara serius dalam pembicaraan mengenai sosok Wakil Presiden," kata Sopiyan dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Sopiyan menilai, Dasco menjadi salah satu figur yang patut diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai calon pendamping Prabowo. Kemampuan membangun komunikasi dan merangkul berbagai kekuatan politik menjadi salah satu pertimbangan utama.

"Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjembatani berbagai kepentingan politik, membangun dialog antarkekuatan partai, serta menjaga stabilitas dan soliditas nasional. Kepemimpinan yang mengedepankan komunikasi dan persatuan menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan," jelasnya.

Selain komunikasi dengan partai politik, Gema Bangsa juga menyoroti pentingnya kemampuan calon Wakil Presiden dalam menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sipil. Sebab, kepemimpinan nasional membutuhkan dukungan dan komunikasi yang terbuka dengan seluruh lapisan masyarakat.

Sopiyan menyebut, Wakil Presiden harus memiliki ruang dialog yang luas dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), kalangan intelektual, mahasiswa hingga aktivis pergerakan. Hubungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kehidupan demokrasi sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.

"Wakil Presiden tidak hanya dituntut mampu berkomunikasi dengan kekuatan politik formal, tetapi juga harus memiliki ruang dialog yang luas dengan tokoh-tokoh civil society, organisasi kemasyarakatan (ormas), kalangan intelektual, mahasiswa, serta para aktivis pergerakan," tegas Sopiyan.

Pertimbangan berikutnya adalah kemampuan menerjemahkan sekaligus mengawal visi dan kebijakan Presiden. Menurut Sopiyan, Wakil Presiden harus bisa menjadi mitra strategis kepala negara agar berbagai program prioritas pemerintah berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Oleh Redaksi · 15 Nov, 16.58 WIB



BANDA ACEH - Ribuan massa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menyerukan agar sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI merupakan figur yang mampu mengayomi seluruh komponen bangsa dan tidak bersikap Islamofobia.

Mantan Ketua Umum Humanika sekaligus Sekretaris Jenderal Prodem, Andrianto Andri mengatakan, posisi Wapres ke depan harus diisi sosok yang memiliki kedekatan dan keselarasan kerja (chemistry) dengan Presiden Prabowo Subianto.

Andrianto yang hadir di Tugu Proklamasi sejak subuh juga mengapresiasi penyelenggaraan ARBI sebagai wadah konsolidasi ormas Islam yang menurutnya sempat mengalami penzaliman dan Islamofobia pada era pemerintahan Joko Widodo.

"Presiden Prabowo saat ini telah kembali pada jalur konstitusi dengan mengakui bahwa seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, memiliki kontribusi besar terhadap Republik Indonesia," kata Andrianto kepada RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Meski demikian, Andrianto mendesak Prabowo segera melakukan pembersihan di jajaran kabinet dari unsur-unsur yang disebutnya sebagai "virus Solo".

"Ke depan tidak boleh lagi terjadi praktik diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap umat Islam, termasuk pembubaran organisasi tanpa melalui proses pengadilan yang sah," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Oversight Committee ARBI, KH Bachtiar Nasir (UBN) menegaskan bahwa kursi Wapres berikutnya harus diisi figur pemersatu bangsa yang tidak bersikap anti terhadap Islam.

Pernyataan tersebut disampaikan Bachtiar saat berorasi di hadapan ribuan massa yang memadati kawasan Monumen Proklamasi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu, 15 November 2026.

"Umat Islam memiliki andil dan saham sejarah yang besar dalam memerdekakan sekaligus menjaga Indonesia. Karena itu, kepemimpinan nasional ke depan wajib diisi sosok yang amanah, pro-rakyat, serta mampu mengakomodasi kepentingan umat secara adil," kata KH Bachtiar.

Di tengah berkembangnya bursa calon pengganti Gibran, nama Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua Majelis Penasihat PAN 2024-2029, Hatta Rajasa, muncul sebagai salah satu figur yang dinilai memenuhi aspek kelayakan teknokratis maupun politis.

Selain Hatta, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga turut disebut dalam bursa Wapres. Dalam wacana yang berkembang di kalangan pendukung aksi, Dasco dinilai memiliki rekam jejak mengayomi umat Islam, salah satunya melalui langkahnya mendatangi Habib Rizieq Shihab (HRS), serta dianggap menunjukkan sikap Politik yang antagonis terhadap pengaruh Solo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo: Yang Bisa Bikin Revolusi di Indonesia adalah Saya

Oleh Redaksi · 14 Nov, 19.38 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya mampu menciptakan revolusi di Indonesia. Kepala Negara menjelaskan revolusi diperlukan untuk memperbaiki sistem yang dinilainya masih keliru, sekaligus menyelamatkan kekayaan negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia."Yang bisa bikin revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto, saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo saat berpidato dalam acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim memiliki dukungan dari sejumlah organisasi Islam besar, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis). Selain itu, Prabowo menyebut petani dan nelayan berada di belakang perjuangannya.

Menurut Prabowo, tekad melakukan perubahan tersebut dilandasi kegelisahannya melihat kondisi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan Indonesia terus diambil dan praktik korupsi masih terjadi.

"Di usia saya pensiun saya harus melihat rakyat saya masih miskin, saya harus melihat kekayaan kita diambil terus, saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, saudara-saudara sekalian," katanya.

Prabowo mengaku tidak akan gentar menghadapi berbagai tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan langkah pembenahan yang dilakukannya. Dia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya demonstrasi hingga kerusuhan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Cerita Prabowo soal Yandri yang Ngotot Jadi Menteri Desa, Awalnya Jatah Bahlil

Oleh Redaksi · 14 Nov, 20.40 WIB



BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto berkelakar banyak pejabat menteri Kabinet Merah Putih yang berwajah Muhammadiyah.Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyapa sejumlah pejabat negara dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Luhut Temui PBNU: Pokoknya Kita Harus Satu, Jangan Merembet Lagi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 16.13 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menerima kunjungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Setelah pertemuan di lantai 3, keduanya melanjutkan kunjungan ke Pojok Gus Dur di lobi gedung PBNU.Gus Kikin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas kondisi Indonesia saat ini dan tantangan bangsa ke depan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

“Kita ini sama-sama berpikir bagaimana kondisi Indonesia hingga saat ini dan nanti ke depan lagi kita tetap sama-sama kita jaga.

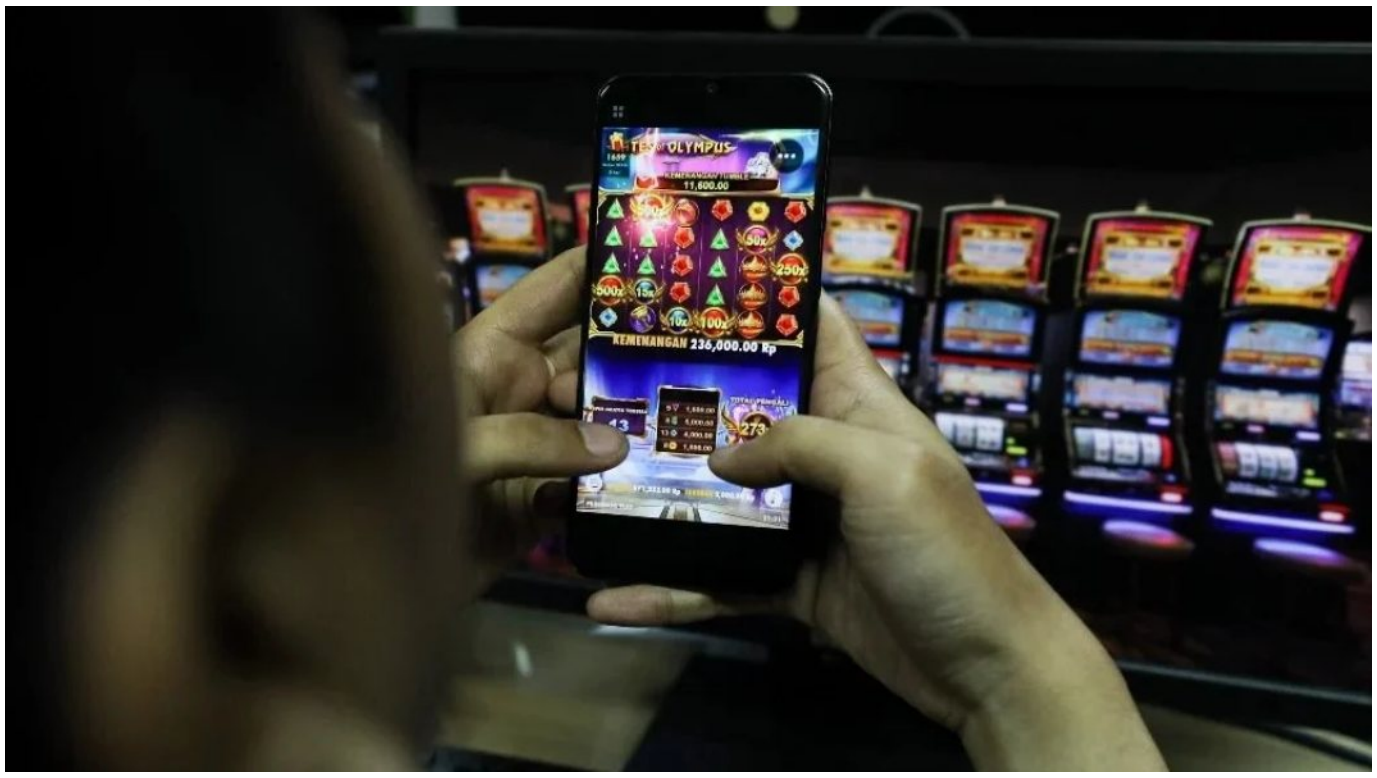
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Siber Duga Dana Judi Online Bisa Biayai Operasi Penyadapan Presiden

Oleh Van · 15 Nov, 16.23 WIB



Fenomena judi online yang semakin marak dan mudah diakses melalui genggaman tangan menggunakan smartphone.

JAKARTA — Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo menduga aliran dana judi online berpotensi berkaitan dengan pendanaan operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan teknologi pengawasan canggih seperti Pegasus.

Dugaan tersebut disampaikan Ibnu dalam siniar di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat, 13 November 2026.

Ia menilai biaya pengadaan spyware kelas tinggi sangat besar sehingga perlu ditelusuri sumber pendanaannya.

"Apakah judi online ini uangnya bermuara pada kegiatan makar ini? Uangnya judi online itu ratusan triliun. Saya termasuk pihak yang sangat yakin uang judi online itu masih ada di Indonesia," jelas Ibnu.

Dugaan Dana Judol untuk Operasi Penyadapan

Ibnu mengaitkan dugaan pendanaan tersebut dengan besarnya perputaran uang judi online di Indonesia.

Menurutnya, dana dari aktivitas ilegal itu berpotensi menjadi sumber pembiayaan operasi pengawasan berskala besar.

Ia memperkirakan pengadaan teknologi seperti Pegasus membutuhkan biaya sangat mahal, bahkan mencapai triliunan rupiah.

Karena itu, Ibnu mempertanyakan kemungkinan adanya sumber dana di luar anggaran resmi lembaga negara.

Namun, dugaan keterkaitan uang judi online dengan operasi penyadapan maupun kegiatan makar belum disertai bukti aliran transaksi yang menghubungkan keduanya.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun pada semester I 2026.

Angka tersebut merupakan nilai perputaran transaksi, bukan bukti bahwa dana dengan jumlah yang sama tersedia sebagai anggaran untuk membiayai operasi tertentu.

Soroti Kemungkinan Keterlibatan Pihak Ketiga

Selain sumber dana, Ibnu menyoroti kemungkinan penggunaan lisensi Pegasus melalui pihak ketiga atau negara lain.

Ia menduga jalur tersebut dapat digunakan untuk menghindari mekanisme pengadaan langsung antarpemerintah atau business to government (B2G).

Pembahasan mengenai kemungkinan pihak ketiga itu muncul ketika Ibnu menyinggung proses pengadaan teknologi pengawasan dan penelusuran pihak yang memiliki akses terhadap perangkat tersebut.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan sejak jauh hari, tetapi masih menunggu waktu untuk mengambil tindakan.

"Pak Prabowo dan lingkaran... saya yakin Pak Prabowo sudah tahu kalau beliau disadap jauh-jauh hari. Tapi beliau harus menemukan momentum pas untuk melakukan tindakan," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan dugaan pribadi Ibnu dalam siniar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Relawan Gibran Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 15 Nov, 19.57 WIB



BANDA ACEH - Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Kali ini, dukungan datang dari relawan Gibran Joeara (GI-JOE).

Ketua GI-JOE Benny Parapat mengatakan, pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto memilih Dasco sebagai calon wapres untuk diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Kami meminta dan mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk memilih dan mengusulkan kepada MPR untuk menempatkan Prof Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden periode 2026 sampai 2029," ujar Benny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026).

Benny menilai, Dasco memiliki kedekatan dengan Prabowo sehingga dinilai mampu membantu mewujudkan program-program Presiden Prabowo. Selain itu, Dasco dianggap piawai menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya partai Politik.

"Tokoh tersebut mampu menjalin komunikasi dan membangun jaringan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen kekuatan-kekuatan politik, kekuatan ekonomi sosial, yang tujuannya adalah pada akhirnya untuk membantu Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Dukungan GI-JOE menambah daftar pihak yang mengusulkan Dasco sebagai pengganti Gibran. Sebelumnya, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra juga menyuarakan dukungan agar Ketua Harian DPP Gerindra tersebut menjadi calon wapres.

Dukungan itu disampaikan sejumlah pimpinan Gerindra dari berbagai wilayah pada Minggu (15/11/2026). Mereka menilai Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk mendampingi Prabowo.

Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras, misalnya, menilai Dasco memiliki dedikasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang baik. Kesamaan visi dan misi Dasco dengan Partai Gerindra juga menjadi salah satu pertimbangannya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni menyebut terdapat tiga pertimbangan yang mendasari dukungan terhadap Dasco, yakni loyalitas kepada Prabowo, partai, dan negara, serta kemampuannya menjaga kepercayaan publik dan berbagai kelompok politik.

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPD Gerindra Kalimantan Barat Yuliansyah. Dia menilai pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika politik nasional

NASIONAL

Luhut Pandjaitan Menguat sebagai Calon Pengganti Gibran di Kursi Wapres

Oleh Redaksi · 14 Nov, 20.23 WIB

BANDA ACEH – Di tengah proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026, nama Luhut Binsar Pandjaitan kembali mencuat dalam spekulasi Politik nasional.Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus mantan Menko Marves itu disebut-sebut masuk radar sebagai salah satu calon yang potensial diajukan Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Istana atau partai koalisi, sejumlah kalangan menilai pengalaman panjang Luhut di pemerintahan Jokowi dan kedekatannya dengan Prabowo menjadi pertimbangan.

Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wapres masa bakti 2024–2029 “atas permintaan sendiri”. MPR telah menerima surat tersebut dan menetapkan sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, serta pengesahan Wapres pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan tidak ada ketentuan konstitusi yang mewajibkan calon berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Luhut sebelumnya aktif membela Gibran di tengah isu pemakzulan terkait polemik ijazah. Ia menyatakan bahwa jika Gibran dimakzulkan, akan ada reaksi karena keduanya dicalonkan bersama Prabowo. Ia juga menegaskan Gibran telah melalui proses verifikasi KPU dan memiliki ijazah setara SMA yang sah.

Sebagai Ketua DEN, Luhut saat ini berperan memberi masukan strategis soal ekonomi, investasi, dan hilirisasi—isu yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Pengalaman sebagai Menko Marves, Kepala Staf Kepresidenan, serta rekam jejak di bidang pertahanan (sebagai purnawirawan jenderal) membuatnya dianggap mampu menjaga stabilitas pemerintahan di sisa masa jabatan 2024–2029.

Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi bahwa Luhut masuk daftar dua nama yang akan disetorkan Prabowo. Nama-nama yang lebih sering beredar dari berbagai sumber justru meliputi kader Gerindra seperti Sugiono dan Sufmi Dasco Ahmad, serta tokoh lain seperti Puan Maharani, AHY, dan Ahmad Muzani.

Partai-partai koalisi, termasuk PAN, menyerahkan sepenuhnya penentuan dua nama kepada Presiden Prabowo. Prabowo telah memberi waktu bagi partai untuk berdiskusi internal.

MPR telah mengirim surat meminta Prabowo segera mengajukan dua nama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukan Lewat Koneksi, Prabowo Bongkar Cara Rahasia Pilih Kapolri!

Oleh Redaksi · 14 Nov, 20.14 WIB

BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan proses di balik penunjukan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Dia mengakui tidak mengenal dekat Suyudi dan hanya bertemu sekali dalam belasan tahun terakhir.Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyapa sejumlah pejabat negara dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

“Saudara-saudara, saya, orang bingung, dari mana ya saya, kadang-kadang saya hanya dengar ada suara enggak tahu dari mana. Saya tanya, dari mana saya kenal Saudara Suyudi ini? Jenderal Suyudi. Saya enggak kenal. Saya enggak kenal,” kata Prabowo.

Prabowo mengingat pernah bertemu Suyudi ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kapolres. Saat itu, Prabowo mengaku sudah berpangkat jenderal sehingga pertemuan mereka hanya berlangsung sepintas.

“Saya ketemu sekali dalam sekian belas tahun, ya kan? Saya lihat dulu ada Polres, Kapolres ya gitu. Dia Kapolres, aku sudah jenderal, dia masih apa. Ya kan? Kalau jenderal itu kalau lihat letnannya itu kadang-kadang sepintas aja,” ujarnya.

Prabowo kemudian mengungkapkan proses pemilihan Kapolri. Ia mengaku sempat menerima sejumlah nama calon pengganti Kapolri, tetapi belum menemukan sosok yang dirasa cocok.

“Pandeglang, Banten. Itu aja. Habis itu, kau Kapolri!” ungkap Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Relawan Jokowi Terseret Korupsi Nikel Rp5,7 T, Nama Arif Kurniawan Disebut sebagai Bos Windu Aji!

Oleh Redaksi · 15 Nov, 11.52 WIB



BANDA ACEH – Jejak bisnis pertambangan Windu Aji Sutanto menyimpan sejumlah persoalan yang patut dibongkar.

Mantan relawan pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Tengah itu bukan hanya pernah terseret perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel Blok Mandiodo dengan kerugian negara sekitar Rp5,7 triliun, tetapi kini juga disorot karena dugaan hubungan bisnisnya dengan Arif Kurniawan, pengusaha yang dijuluki Raja Nikel Indonesia.

Nama Windu menjadi semakin menarik perhatian ketika rekam jejak politiknya sebagai bagian dari barisan relawan pemenangan Jokowi disandingkan dengan perjalanan bisnis pertambangan yang membawanya berhadapan dengan hukum.

Pertanyaan publik pun mengemuka: sejauh mana jejaring bisnis dan relasi yang dimiliki Windu berkembang, siapa yang berada di belakang aktivitas bisnisnya, dan apakah ada pihak lain yang selama ini menikmati keuntungan dari gurita perdagangan nikel?

Seorang pengusaha tambang yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan Windu secara tegas menyebut Arif Kurniawan sebagai bos Windu.

"Arif ini bosnya Windu," ungkap sumber tersebut di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan itu menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh dugaan hubungan antara kedua nama tersebut. Apalagi, Arif dikenal sebagai pemain besar dalam perdagangan bijih nikel nasional.

Sumber tersebut juga mengungkap dugaan praktik pengambilalihan tambang milik pengusaha lain dengan memanfaatkan persoalan hukum yang sedang dihadapi pemiliknya. "Dia mengambil tambang semena-mena," katanya.

Salah satu kasus yang diceritakan berkaitan dengan tambang seluas kurang lebih 200 hektare di Kalimantan. Pemilik tambang yang sedang menghadapi persoalan disebut mendatangi Windu untuk meminta bantuan penyelesaian masalah.

Windu, yang saat itu dikenal sebagai operator pertambangan, kemudian disebut meminta dokumen-dokumen pertambangan dengan alasan akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Namun, menurut sumber itu, penyelesaian yang dijanjikan tidak kunjung datang. Lokasi tambang justru dipasangi garis polisi. Dalam situasi tersebut, Windu disebut menawarkan agar tambang yang sedang bermasalah diserahkan kepadanya.

"Sudahlah, serahkan saja tambang yang bermasalah itu," tutur sumber tersebut menirukan perkataan Windu.

Pengelolaan tambang itu kemudian disebut beralih kepada Windu. Sumber tersebut menduga pola serupa bukan hanya terjadi sekali dan menuding adanya dugaan kerja sama dengan oknum kepolisian dalam sejumlah pengambilalihan tambang.

Tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Namun, keterangan itu layak ditindaklanjuti aparat penegak hukum melalui pemeriksaan saksi, dokumen perizinan, dan aliran transaksi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pidato Pengunduran Diri Gibran Dikritik, Didik Sebut Itu Drama Politik

Oleh Redaksi · 15 Nov, 19.04 WIB



BANDA ACEH - Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pidato pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden adalah bagian dari drama Politik yang berpotensi membentuk citra seolah-olah dirinya menjadi korban.Merinci, kata Didik, ada dua pernyataan Gibran yang bertolak belakang dalam rentang waktu kurang dari sehari. Menurutnya, Gibran sebelumnya menyampaikan akan berjuang di pengadilan, tetapi kemudian mengumumkan pengunduran diri dengan alasan kepentingan bangsa yang lebih besar.

“Saya yakin pidato itu palsu karena sehari sebelumnya telah membohongi presiden akan fight di pengadilan. Lalu esoknya pidato keputusan ini demi bangsa kepentingan yang lebih besar. Hanya dalam jarak waktu kurang sehari ada dua perkataan yang bertolak belakang dari dirinya,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut adalah permainan citra playing the victim. Dengan pidato yang bernuansa kenegarawanan dinilai dapat membentuk persepsi bahwa Gibran merupakan pihak yang dikorbankan dalam dinamika politik.

“Ini adalah permainan image ‘playing the victim’, yang dimainkan banyak politisi dan Jokowi sendiri selama 10 tahun lebih berkuasa,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal pidato Gibran yang menyebut keputusan mengikuti Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Ia menilai bahwa pencalonan tersebut merupakan proses politik yang telah berlangsung sebelum kontestasi.

Narasi pidato Gibran, kata Didik, berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan proses pencalonan dan aspek konstitusional yang menyertainya. Jika ditelaah, usia calon presiden dan wakil presiden diubah dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Untuk diketahui, Gibran menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden melalui surat tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua MPR. Dalam pidato perpisahannya, ia menyebut keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara.

NASIONAL

Belum Puas Gibran Mundur, DPR Mau Masalah Pencalonannya Diusut Tuntas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 19.35 WIB

BANDA ACEH - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai belum otomatis menutup berbagai persoalan konstitusional yang selama ini menjadi sorotan publik.Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo, menegaskan bahwa pengawasan serta tindak lanjut atas persoalan tersebut tetap perlu dikawal melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Keduanya menyampaikan pandangan tersebut setelah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tidak ditemukannya dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran dan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Yanuar Arif Wibowo menilai perjalanan Gibran sejak proses pencalonan hingga menjabat sebagai Wakil Presiden memang menjadi catatan penting bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa generasi muda tetap harus memperoleh kesempatan untuk berkiprah dalam pemerintahan. Namun, kesempatan tersebut harus ditempuh melalui jalur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Yanuar juga menilai persoalan administratif yang berujung pada putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ia berharap polemik tersebut bisa menjadi pelajaran agar proses Politik dan ketatanegaraan ke depan berjalan sesuai aturan.

“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” ungkap Yanuar.

Senada, Harris menilai masih terdapat proses konstitusional yang perlu mendapat perhatian meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri. Ia mengingatkan agar konstitusi tidak diperlakukan secara fleksibel hanya untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun keluarga tertentu.

“Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” kata Harris.

Diberitakan sebelumnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden terhitung sejak 12 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

GMNI Desak DPR Bentuk Pansus Penyadapan, Minta Jokowi dan Listyo Sigit Diproses Hukum

Oleh Redaksi · 14 Nov, 19.49 WIB

BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) mengeluarkan tuntutan Politik dan hukum terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta penyadapan ilegal yang dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.Dalam pernyataan sikap bertajuk "Darurat Republik: Adili Jokowi, Sigit, dan Kroninya", DPD GMNI mendesak agar Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta pihak-pihak yang disebut terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan diproses melalui mekanisme hukum yang terbuka dan transparan.

Selain itu, GMNI secara khusus meminta DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan instrumen negara.

Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se atau Dendy Se, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan politik antarkelompok, tetapi harus menjadi perhatian serius dalam menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi.

Dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi mediaindonesianews, Sabtu (14/11/2026), GMNI menyoroti dugaan penyadapan ilegal, persekongkolan kekuasaan, serta praktik politik dinasti yang menurut organisasi tersebut berpotensi merusak prinsip demokrasi dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.

GMNI juga menilai fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu diperkuat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa negara harus kembali menjalankan mandat konstitusi untuk melayani kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil atau kaum Marhaen, bukan menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan segelintir pihak.

Dalam tuntutannya, DPD GMNI menyampaikan empat poin utama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mantan Wakapolri Beberkan Penyadapan LSP Sebenarnya Disetor ke Siapa, 'Buka Saja!'

Oleh Redaksi · 15 Nov, 11.35 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama mantan Wakil Kepala Polri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Keduanya menilai pembenahan institusi kepolisian perlu dilakukan mulai dari sistem karier, mekanisme penegakan etik, hingga pelayanan terhadap pengaduan masyarakat.

Dalam dialog di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menilai penangkapan mantan pimpinan Polri dalam kasus dugaan penyadapan menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan institusi.

Ia juga menyinggung pergantian pimpinan Polri kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang disebut sebagai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan unsur-unsur bermasalah di tubuh Korps Bhayangkara.

Sementara itu, Oegroseno memaparkan sejumlah usulan reformasi struktural untuk memperbaiki sistem dan kultur kepolisian. Sebab, di bawah kepemimpinan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) banyak masalah.

"Salah satu hal yang disorot adalah sistem mutasi dan pengembangan karier anggota Polri," kata Oegroseno.

Menurut Oegroseno, penempatan jabatan harus didasarkan pada sistem pengendalian karier yang objektif, bukan dipengaruhi faktor suka atau tidak suka (like and dislike).

Ia juga mengusulkan agar anggota kepolisian mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan pada setiap jenjang karier tanpa harus terbebani biaya.

Selain itu, Oegroseno menilai perlu dibentuk Dewan Kehormatan Perwira yang melibatkan unsur eksternal dan tokoh masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan dapat menangani pelanggaran etik yang dilakukan perwira tinggi, termasuk Kapolri, secara objektif dan tidak berlarut-larut.

Reformasi juga dinilai perlu menyentuh struktur kepangkatan. Oegroseno mengusulkan evaluasi terhadap jenjang pangkat tamtama dan bintara yang dianggap terlalu panjang sehingga berpotensi menghambat perkembangan karier anggota di lapangan.

Kritik terhadap Budaya "No Viral No Justice"

Selain pembenahan internal, Mahfud MD dan Oegroseno turut mengkritik fenomena no viral no justice, yakni kondisi ketika masyarakat merasa harus membuat suatu perkara viral di media sosial agar mendapatkan perhatian dan keadilan.

Mahfud mengingatkan, ketergantungan terhadap viralitas dapat menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, fenomena tersebut rawan dimanfaatkan melalui operasi pendengung atau buzzer yang justru dapat mengaburkan kebenaran suatu perkara.

Di sisi lain, Oegroseno meminta slogan "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung Kapolri baru tidak berhenti sebagai jargon. Ia mendorong penguatan peran Polres dan Polda agar lebih responsif dalam menangani pengaduan warga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jejak 'Geng Solo' di TNI-Polri, Siapa yang Masih Bertahan di Lingkar Kekuasaan?

Oleh Redaksi · 15 Nov, 11.08 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah sejumlah pejabat dan mantan pejabat Polri dikaitkan dengan perkara tersebut.

Perkembangan ini tidak hanya memunculkan persoalan hukum, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai konfigurasi kekuasaan dan jejaring pengaruh di tubuh institusi keamanan.

Di tengah bergulirnya kasus tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mulai melakukan penataan internal Polri melalui mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah. Langkah ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan peta kepemimpinan, termasuk terkait pengaruh kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kerap disebut sebagai "Geng Solo". Istilah tersebut merujuk pada kelompok yang dikaitkan dengan kedekatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu perkembangan terbaru adalah penarikan dua jenderal dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP), yakni Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan. Keduanya disebut memiliki kedekatan dengan Listyo Sigit dan termasuk dalam daftar 25 perwira tinggi serta perwira menengah yang mengalami mutasi maupun promosi jabatan berdasarkan keputusan Kapolri.

Rangkaian mutasi itu memunculkan pertanyaan mengenai arah penataan internal Polri. Apakah perubahan jabatan tersebut sebatas rotasi dan penyegaran organisasi yang lazim dilakukan, atau merupakan bagian dari upaya mengubah peta pengaruh di tubuh Korps Bhayangkara setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden?

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan masa kepemimpinan Listyo Sigit yang berlangsung hampir enam tahun. Selama periode itu, muncul dugaan bahwa sejumlah posisi strategis di Polri ditempati oleh perwira yang memiliki kedekatan dengannya. Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri pun memunculkan kemungkinan penataan ulang jejaring pejabat yang terbentuk selama masa kepemimpinannya.

Dinamika Penataan Kepemimpinan di Tubuh TNI

Wacana penataan ulang jejaring pengaruh di institusi keamanan tidak hanya mengarah ke Polri, tetapi juga merambah ke tubuh TNI. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, posisi Panglima TNI masih dijabat Jenderal TNI Agus Subiyanto. Belum adanya pergantian pucuk pimpinan militer tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap konfigurasi kepemimpinan dan jejaring pengaruh di lingkungan TNI.

Meski sama-sama berasal dari matra TNI Angkatan Darat, perjalanan karier Agus Subiyanto juga memperlihatkan sejumlah persinggungan dengan Jokowi, baik ketika masih menjabat kepala daerah maupun presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Disinyalir Siapkan Tandyo Gantikan Agus sebagai Panglima TNI

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.59 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto disinyalir tengah menyiapkan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Nama Tandyo mencuat setelah dirinya digeser dari Wakil Panglima TNI menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai Tandyo berpeluang menjadi prioritas Prabowo untuk dipromosikan menduduki posisi tertinggi di lingkungan TNI tersebut.

"Tampaknya Tandyo menjadi salah satu prioritas yang nantinya akan dipromosikan sebagai Panglima TNI menggantikan Agus Subiyanto," tutur Zaki.

Menurut Zaki, pergantian Panglima TNI sebenarnya bukan kebutuhan yang terlalu mendesak. Namun, pergeseran jabatan Tandyo menjadi KSAD patut dicermati sebagai bagian dari kemungkinan penataan komposisi pimpinan TNI oleh Prabowo.

Perubahan posisi Tandyo tersebut terjadi pada 15 Oktober 2026. Saat itu, Prabowo melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD.

Langkah tersebut membuat Tandyo memiliki pengalaman sebagai kepala staf angkatan, salah satu persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI setelah posisi tersebut kembali diisi.

Sinyal kemungkinan Tandyo masuk dalam bursa pengganti Agus juga disinggung anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Dia menilai perubahan komposisi pimpinan TNI AD membuat terdapat dua jenderal yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Panglima TNI, yakni Tandyo dan Maruli Simanjuntak.

"Jadi, yang wakil panglima (Tandyo) tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang dari AD dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru," ujar Hasanuddin.

Ketika ditanya apakah pengangkatan Tandyo sebagai KSAD merupakan sinyal Prabowo akan mengganti Agus Subiyanto, politikus PDIP tersebut tidak memberikan kepastian.

"Bisa sinyal, bisa tidak," katanya.

Di tengah munculnya nama Tandyo, Komisi I DPR juga belum memberikan kepastian mengenai perkembangan rencana pergantian Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, sebelumnya meminta publik menunggu proses pembahasan di parlemen.

"Tunggu saja prosesnya daripada menerka-nerka siapa saja nama dalam Surpres tentang Panglima TNI," kata Dave sebagaimana dikutip Katadata, Selasa …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa di Balik Penyadapan Prabowo? PBNU Kini Mulai Ambil Sikap Tegas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.54 WIB

BANDA ACEH - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyesalkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Organisasi tersebut meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangani kasus itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah pelaksanaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Gus Kikin.

PBNU menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum. Karena itu, organisasi tersebut menyatakan mendukung proses penanganan perkara dan menyerahkannya kepada Polri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakpus Singgung Penyadapan Listyo cs: Lawan Pengkhianat Bangsa!

Oleh Redaksi · 15 Nov, 11.47 WIB



BANDA ACEH -Aksi Rakyat Bela Indonesia digelar di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam dan serikat buruh dengan membawa lima tuntutan utama terkait kondisi bangsa.

Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, dalam orasinya mengajak masyarakat bersatu membela Indonesia. Dia juga menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang disebutnya sebagai pengkhianat bangsa dan negara.

"Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan," kata Bachtiar.

Seruan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Selain Listyo Sigit, ketiga perwira tinggi tersebut yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung persoalan oligarki dan penguasaan aset negara. Bachtiar meminta pemerintah menindak pihak-pihak yang dinilainya telah merugikan negara dan menindas masyarakat kecil.

"Hari ini dari tempat ini kita juga menuntut: segera tangkap, kalau perlu hadapkan moncong senjata, seperti moncong senjata dihadapkan kepada santriwati di Sukoharjo yang dihadapkan pada malam hari dan dini hari itu dengan cara tidak adil," ujarnya.

Selain itu, Bachtiar meminta pemerintah menegakkan Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan pengelolaan perekonomian ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Dia mengingatkan agar upaya memberantas oligarki tidak justru melahirkan oligarki baru.

Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia yakni rakyat bersatu membela Indonesia, melawan pengkhianat bangsa dan negara, melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara, menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menegakkan hukum secara konsisten.

"Para tokoh Islam, para pemimpin Islam di Indonesia khususnya, mari rapatkan barisan. Jangan mau dipecah belah lagi seperti kemarin," katanya.

Dalam orasinya, Bachtiar turut menyerukan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dia mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menyuarakan penghentian genosida di Gaza

NASIONAL

LAPD Desak DPR Tetap Proses HMP Meski Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 15 Nov, 13.38 WIB



BANDA ACEH -Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) meminta DPR tetap memproses dan mencatat secara resmi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak boleh secara sepihak menghapus catatan maupun alasan konstitusional yang mendasari pengajuan usulan HMP tersebut.

Terlebih, usulan HMP itu disebut telah disampaikan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

"Keberanian 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan HMP patut dicatat sebagai perkembangan Politik," ujar Kaka kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Kaka, DPR harus membuktikan independensinya dengan memastikan seluruh proses kelembagaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak sekadar mengikuti dinamika politik.

"LAPD berpandangan, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda," tuturnya.

"Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku menurut ketentuan konstitusi, DPR perlu menilai kembali kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada," sambung Kaka menegaskan.

Namun, menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini, hal tersebut tidak berarti DPR dapat mengabaikan persoalan yang melatarbelakangi munculnya usulan HMP.

Karenanya, Kaka mendesak DPR juga harus memastikan status pengunduran diri Gibran melalui konfirmasi resmi, termasuk waktu dan mekanisme berlakunya.

"Jika pengunduran diri telah efektif, DPR perlu mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan berdasarkan UUD 1945," ucapnya.

Kaka menegaskan, keberanian anggota DPR mengajukan HMP harus dibuktikan melalui konsistensi dalam mengawal persoalan hingga memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur. Jangan biarkan persoalan konstitusional selesai sebagai kompromi politik," demikian Kaka menambahkan.

NASIONAL

Profil Brigjen Tedjo Kusumo, Eks Dir Intelijen Densus 88 yang Dikaitkan dengan Sosok TK

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.39 WIB

BANDA ACEH - Nama Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Tedjo Kusumo mencuat di tengah pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perwira tinggi yang lama berkarier di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri itu disebut-sebut sebagai sosok berinisial TK yang kini menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.Nama Tedjo dihubungkan dengan perkara tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah media. Namun, Mabes Polri sejauh ini baru mengonfirmasi bahwa TK merupakan perwira tinggi aktif berpangkat brigadir jenderal, tanpa mengumumkan nama lengkapnya.

Di balik itu, Tedjo ternyata memiliki hubungan almamater dengan salah satu tersangka kasus penyadapan Prabowo, yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Keduanya merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999, Batalyon Endra Dharmalaksana. Nama Tedjo dan Eko bahkan tercantum dalam daftar perwira tinggi alumni angkatan tersebut yang telah menyandang pangkat jenderal bintang satu pada 2025.

Eko diketahui menjadi salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal yang diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam konstruksi perkara, Eko diduga pernah menerima perintah penyadapan ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabagmon).

Sementara itu, nama TK muncul setelah Kapolri membeberkan dugaan peran tersangka Irjen Ahrie Sonta dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menyebut Ahrie tidak hanya diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kemudian memastikan TK merupakan perwira tinggi bintang satu yang sedang diperiksa Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Tedjo bukan sosok baru dalam penugasan penyelidikan dan intelijen kepolisian.

Sebelum menduduki sejumlah posisi strategis di Densus 88, ia pernah bertugas di Korps Brigade Mobile (Brimob).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sekjen Golkar: Presiden Beri Waktu Seminggu para Pimpinan Partai Usulkan Calon Wapres

Oleh Redaksi · 15 Nov, 08.15 WIB



BANDA ACEH -Partai Golkar mengaku Presiden RI, Prabowo Subianto meminta agar para pemimpin partai mengusulkan Wakil Presiden RI pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat penutupan ajang Golkar E-Sport Tournament 2026 Piala Main Bareng Golkar (MBG) di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Sabtu malam, 14 November 2026.

"Pak Presiden memberi waktu ya kira-kira seminggu untuk para pimpinan partai

Namun partai berlambang beringin ini belum pasti menyodorkan nama pengganti Gibran. Hingga kini Sarmuji menyebut belum ada partai yang mengetahui calon tersebut.

"Tapi calonnya sendiri saya sama sekali sampai sekarang ini saya tidak tahu," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengajak publik untuk bersabar soal nama Wapres.

"Nantilah, kami belum selesai merenung, ya," pungkas Sarmuji.

NASIONAL

PKS Wanti-Wanti Teliti Ijazah Wapres Baru Pengganti Gibran: Jangan Sampai Digugat lagi

Oleh Redaksi · 15 Nov, 08.19 WIB



BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR, Tifatul Sembiring, menekankan pentingnya proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan konstitusi. Dia mengingatkan agar seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh guna mencegah munculnya persoalan hukum maupun polemik setelah pemilihan.

Tifatul menjelaskan, rapat gabungan telah menyepakati sejumlah langkah, termasuk pengiriman surat kepada Presiden dan pembentukan tim verifikasi serta tim ad hoc.

MPR menargetkan pemilihan Wapres melalui sidang paripurna pada Rabu 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, yang dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan setelah calon terpilih.

Menurut Tifatul, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen dan terpenuhinya syarat pencalonan, mulai dari ijazah, administrasi, hingga kesehatan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara cermat agar legitimasi Wapres terpilih tidak dipersoalkan di kemudian hari.

“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” kata Tifatul dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).

Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang itu. Penentuan perwakilan PKS akan dibahas lebih lanjut secara internal. Sementara itu, tim ad hoc bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih.

Dia juga menegaskan pengajuan dua calon Wapres merupakan kewenangan Presiden, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap tahapan perlu dilaksanakan secara tertib, dengan mengedepankan kepastian hukum dan ketelitian administrasi.

“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden bukan karena persoalan ijazah. Dia menyebut keputusan tersebut diambil secara pribadi setelah melalui pertimbangan panjang dan matang.

Penegasan itu disampaikan Gibran melalui pernyataan yang diunggah di media sosial pada Kamis (12/11/2026). Dalam pernyataannya, dia secara khusus membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jimly: UUD 1945 Tak Batasi Pengganti Wapres Harus dari Partai Pengusung

Oleh Redaksi · 14 Nov, 14.41 WIB

BANDA ACEH – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai Politik (parpol) pengusung.Menurut Jimly, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik “Sosialisme Islam” di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Jimly menjelaskan, polemik tersebut berakar pada perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Penjelasan UU MD3 menyebutkan calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai politik pengusung.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai, artinya diajukan presiden, dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Jimly menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 keliru karena menganalogikan kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Jimly memaparkan, persyaratan usulan dari partai politik hanya berlaku apabila terjadi kekosongan kedua jabatan tersebut sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam kondisi itu, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh triumvirat yang terdiri atas menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.

Sementara itu, dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan hanya posisi wakil presiden yang kosong. Karena itu, ketentuan yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.

Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan dalam menentukan calon pengganti wakil presiden karena UUD 1945 tidak membatasi asal partai kandidat. Calon tersebut dapat berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai.

Jimly juga menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait persoalan tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Giring-Raja Juli Sampel Orang Dekat Gibran yang Takut Didepak Istana

Oleh Redaksi · 15 Nov, 19.51 WIB



BANDA ACEH -Pengunduran diri tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan partai berkaitan dengan kekhawatiran kehilangan posisi di pemerintahan.

Pengamat Politik dan hukum, Muslim Arbi menduga, keputusan ketiganya keluar dari partai demi mengamankan jabatan di tengah dinamika Politik pasca-Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Tiga kader PSI itu jelas sekali karena takut didepak dari pemerintahan. Maka mereka cari selamat. Dan bisa jadi seperti Raja Juli banyak dikritik soal kehutanan sehingga berurusan dengan hukum, maka lebih aman keluar dari PSI," kata Muslim kepada redaksi, Minggu, 15 November 2026.

Selain menyoroti mantan kader PSI, Direktur Gerakan Perubahan tersebut juga mengingatkan potensi dampak perubahan konstelasi politik terhadap orang-orang dekat Gibran yang masih menduduki jabatan di kabinet maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Muslim menilai kelompok tersebut sebaiknya mengundurkan diri agar tidak menghambat kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

"Gibran sudah bukan wapres lagi. Tentunya itu pasti berdampak pada orang-orang Gibran di lingkaran kekuasaan. Mestinya mereka hengkang dari pemerintahan karena bisa jadi 'duri' dalam daging. Sebaiknya mundur nunut bosnya," pungkas Muslim tanpa menyebutkan orang-orang yang dimaksud

NASIONAL

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Oleh Redaksi · 15 Nov, 16.55 WIB



BANDA ACEH -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Berdasarkan penelusuran RMOL di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Minggu, 15 November 2026, gugatan tersebut diajukan oleh Waterman David Gea pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor perkara 1419/Pdt.G/2026/PN Jkt.Sel. Nilai gugatan tercatat sebesar Rp1 miliar.

Selain Nusron Wahid, terdapat lima pihak lainnya yang turut menjadi tergugat, yakni Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, Nugraha, Pangasian Hatigoran Sirait, Darius Duhuzaro Gulo, dan Barnabas Laowo.

Perkara dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum itu didaftarkan dengan tanggal surat Rabu, 4 November 2026. Namun, petitum atau tuntutan penggugat belum dapat ditampilkan dalam SIPP sehingga pokok permasalahan dan tuntutan yang diajukan belum diketahui secara terperinci.

Berdasarkan jadwal persidangan, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 Desember 2026, pukul 09.30 WIB dengan agenda pemanggilan kepada para pihak di Ruang Sidang 03 PN Jaksel.

NASIONAL

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Oleh Redaksi · 15 Nov, 08.09 WIB



BANDA ACEH -Tokoh muda Aceh, Wanda Assyura, menyampaikan aspirasi agar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wanda, pengalaman Dasco dalam membangun komunikasi Politik dan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam kepemimpinan nasional.

Ia menilai Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak dan mencari jalan tengah di tengah perbedaan kepentingan politik.

"Saya melihat Pak Dasco memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi politik. Kemampuan mempertemukan berbagai kepentingan dan menjadi penghubung antarkekuatan politik merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan," ujar Wanda dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 15 November 2026.

Sebagai tokoh muda Aceh, Wanda juga menyoroti peran Dasco dalam penyelesaian persoalan empat pulau yang sempat menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara pada 2025.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Sebagai orang Aceh, saya melihat persoalan empat pulau itu menjadi salah satu contoh penting bagaimana komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat dapat membantu menyelesaikan persoalan daerah," jelasnya.

Wanda juga menilai kemampuan Dasco membangun hubungan antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting. Terlebih, Dasco selama ini memiliki peran dalam menyampaikan berbagai perkembangan politik serta masukan DPR kepada Presiden Prabowo.

Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga mampu menjaga persatuan dan membuka ruang dialog.

"Negara ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi negosiator, merangkul berbagai kepentingan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang pembangunan," tegasnya.

Wanda berharap, kepemimpinan nasional ke depan juga memberikan perhatian lebih besar terhadap generasi muda, khususnya persoalan lapangan kerja, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pemerataan pembangunan.

"Harapan kami, generasi muda memiliki ruang lebih besar dalam pembangunan. Wakil Presiden juga harus mampu membantu Presiden memastikan program pemerintah berjalan dan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian," tambahnya.

Ia menilai pengalaman, integritas, serta kemampuan menjembatani perbedaan perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembicaraan mengenai figur pendamping Presiden Prabowo.

Bagi Wanda, kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terlihat dari jabatan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuannya membangun komunikasi dan menyatukan berbagai elemen bangsa.

NASIONAL

Roy Suryo Tumpengan Rayakan Mundurnya Gibran: Jangan Lupa Diadili Bareng Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.22 WIB

BANDA ACEH - Pakar Telematika Roy Suryo menghadiri acara tumpengan syukuran atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11/2026).Dalam kegiatan tersebut, ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya urusan penentuan sosok pengganti eks wakil presiden itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun Roy mendesak agar politikus muda itu tetap diproses secara hukum bersama dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kita serahkan ke Pak Prabowo untuk calon penggantinya," kata Roy Suryo.

Menurut Roy, fokus tuntutannya selama ini bukan sekadar agar politikus muda itu mundur dari kursi orang nomor dua di pemerintahan, melainkan proses pemakzulan.

Ia berpendapat bahwa langkah pemakzulan tetap perlu ditempuh supaya sang mantan wapres tidak lagi berhak menerima tunjangan maupun fasilitas dari negara sebagai mantan wakil presiden.

Selain menyoroti soal hak fasilitas negara, ia juga meminta agar proses pertanggungjawaban hukum tetap ditegakkan terhadap Gibran dan Jokowi.

"Yang mau diganti ini diadili dulu. Ya, jangan seenaknya, jangan lupa, bukan hanya dia. Bapaknya (Jokowi) juga," ujar Roy.

Aksi tumpengan di depan kompleks parlemen tersebut digelar sebagai bentuk respons sejumlah elemen masyarakat menyusul langkah Politik dari Gibran.

Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tstana maupun partai koalisi mengenai siapa dua nama yang akan secara resmi disetorkan presiden untuk dipilih sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga tak memberikan banyak tanggapan ketika diminta untuk memberikan bocoran terkait sikap internal koalisi pemerintahan dalam menggodok nama pengganti dari Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Tak Punya Nyali Jadi Oposisi

Oleh Redaksi · 15 Nov, 08.12 WIB



BANDA ACEH -Pengamat Politik Adi Prayitno menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk tidak menjadi oposisi setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden berkaitan dengan beratnya tantangan berada di luar kekuasaan.

Menurut Adi, menjadi oposisi bukan sekadar lantang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dibutuhkan sumber daya, kapasitas, kompetensi, pengalaman, hingga keberanian untuk mengambil posisi berseberangan dengan penguasa.

"Suka tidak suka menjadi oposisi itu tidak gampang. Butuh resource, butuh kapasitas, harus punya kompetensi, punya jam terbang dan tentu punya nyali untuk berada di luar kekuasaan. Karena menjadi oposisi itu harus siap berjalan di tempat yang sunyi," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 15 November 2026.

Hal itu disampaikan Adi menanggapi pernyataan Gibran di hadapan organisasi relawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Saat itu, Gibran menegaskan tidak akan menjadi oposisi meskipun telah mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Ia justru meminta para pendukung dan relawannya tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.

Adi menilai, pilihan tersebut tidak terlepas dari karakter dan latar belakang Politik Gibran beserta kelompok pendukungnya.

"Karena faktor itulah Gibran dan para pendukung politiknya tidak mengambil oposisi," ujarnya.

Ia menjelaskan, figur-figur yang selama ini konsisten berada di jalur oposisi umumnya memiliki latar belakang sebagai aktivis dan penggiat demokrasi.

Karena itu, menurut Adi, menjadi oposisi bukan semata-mata persoalan keberanian berbicara keras. Lebih dari itu, dibutuhkan kesiapan menghadapi konsekuensi politik, termasuk kehilangan akses terhadap kekuasaan.

"Menjadi oposisi bukan persoalan nyaring tidak nyaring bicara. Ini soal kemampuan, termasuk soal nyali, keberanian untuk berada di luar kekuasaan, lantang dan galak mengkritisi segala apa pun yang terjadi," pungkasnya.

NASIONAL

Tak Cukup Ganti Kapolri, Prabowo Didorong Copot Panglima TNI 'Warisan' Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.51 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto didorong tidak berhenti melakukan penyegaran di tubuh Polri dengan menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit. Perlu dilanjutkan dengan mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan darah segar di TNI. Langkah cepat mengakhiri bayang-bayang rezim Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berakhir masanya.Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai pergantian Panglima TNI menjadi bagian dari penyegaran pucuk pimpinan aparat negara yang dapat dilakukan Presiden Prabowo. Terlebih, Agus Subiyanto merupakan Panglima TNI yang diangkat oleh Jokowi pada November 2023, sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

Menurut Efriza, setelah pergantian Kapolri, momentum penyegaran sebaiknya juga menyentuh institusi TNI. Langkah tersebut dapat memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo telah membangun kepemimpinan sendiri dan tidak lagi dibayangi pemerintahan sebelumnya.

"Setelah pergantian Kapolri memang akan lebih baik disertai pergantian kepada Panglima TNI dan juga Jaksa Agung," kata Efriza saat dihubungi inilah.com, Jumat (13/11/2026).

Sorotan terhadap posisi Agus muncul setelah Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Pergantian tersebut telah melalui proses persetujuan DPR, termasuk uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.

Prabowo Disinyalir Siapkan Tandyo Gantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

Dengan perubahan kepemimpinan di Polri tersebut, wacana penyegaran di institusi TNI kembali menjadi perhatian. Agus sendiri menjabat Panglima TNI sejak 22 November 2023 setelah menggantikan Laksamana Yudo Margono.

Efriza berpandangan, keberadaan pejabat yang diangkat pada era Jokowi perlu menjadi bagian dari evaluasi Prabowo dalam membangun soliditas pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Pegang Kunci Pengganti Gibran, Prabowo Tak Bisa Tunjuk Sepihak

Oleh Redaksi · 15 Nov, 08.23 WIB



BANDA ACEH – Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Sugianto menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tidak bisa dilakukan sepihak oleh Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, konstitusi mengatur Presiden hanya berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan memilih pengganti berada di tangan MPR.

"MPR memiliki tanggung jawab konstitusional setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden harus mengusulkan dua orang calon, sementara kewenangan memilih satu di antaranya berada pada MPR," kata Sugianto, kepada Monitorindonesia.com Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan, mekanisme penggantian wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam beleid itu, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan untuk mencegah kekosongan kekuasaan sekaligus menjaga keberlangsungan pemerintahan.

"Ketentuan tenggat waktu paling lama 60 hari dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power," ujarnya.

Dia menambahkan, meskipun setelah amendemen UUD 1945 kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, lembaga tersebut tetap memiliki kewenangan khusus dalam proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Dalam mekanisme tersebut, Presiden tidak bisa menunjuk wakil presiden secara sepihak. Sebaliknya, MPR juga tidak memiliki kewenangan mengusulkan calon sendiri karena dua nama calon harus berasal dari usulan Presiden.

Setelah memilih satu nama, MPR juga berwenang melantik wakil presiden terpilih. Masa jabatan pengganti tersebut hanya berlangsung hingga berakhirnya masa jabatan wakil presiden yang digantikan.

Namun, Sugianto menegaskan proses tersebut harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional, termasuk tahapan yang berkaitan dengan pernyataan pendapat DPR dan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi apabila pengunduran diri diproses melalui mekanisme pemberhentian.

Sugianto juga menekankan, Presiden Prabowo sebaiknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan partai Politik pengusung maupun gabungan partai politik pendukung pemerintahan sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

"Presiden Prabowo Subianto harus mengundang ketua umum partai politik pengusung untuk membahas calon wakil presiden pengganti," pungkasnya

NASIONAL

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Oleh Redaksi · 15 Nov, 17.08 WIB



Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tampak mengenakan setelan jas hitam, dasi merah, dan peci hitam. Prabowo sedang berbicara sambil memberikan isyarat tangan, sementara Sandiaga

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto layak mempertimbangkan mantan Menteri Pariwisata periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno menempati kursi Wapres yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Demikian usulan dari Fungsionaris Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawann TNI/Polri (FKKPI) RH Victor Aritonang kepada wartawan, Minggu 15 November 2026.

Apalagi, kata Victor, rekam jejak akademis Sandiaga tidak kaleng-kaleng. Sandiaga tercatat lulusan

Universitas George Washington (1992), Wichita State University (1990) dan Universitas Pelita Harapan.

Pengalaman Sandiaga relatif cukup baik, karena selain pengusaha sukses, juga pernah menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta (2017-2018) dan Cawapres Prabowo pada Pilpres 2019.

"Sandiaga paham tentang ekonomi, berhasil membangun berbagai usaha," kata Victor.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mencari pengganti Wapres sepulang dari kunjungan ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China.

“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti Wapres,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR paling lambat dalam 60 hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

NASIONAL

Din Syamsuddin: Mundurnya Gibran Bermata Dua, Harus Diusut Lewat Proses Pidana

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.14 WIB

BANDA ACEH - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus inisiator Forum Guru Besar Indonesia, Din Syamsuddin, angkat bicara terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.Din menilai, pengunduran diri Gibran merupakan keputusan yang layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai positif dan elegan demi menjaga marwah negara konstitusi, sebagaimana tuntutan 150 guru besar.

Namun, di sisi lain, peristiwa tersebut berpotensi menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena seorang wakil presiden mundur akibat persoalan yang mencederai kehormatan jabatan.

“Walau Seruan 150 Guru Besar yang saya termasuk pemrakarsa sudah terpenuhi, namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden serta upaya mantan Presiden Jokowi, sang ayah, yang masih bermanuver Politik,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.

Atas situasi tersebut, Din menyayangkan sikap DPR RI yang menghentikan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurutnya, HMP merupakan salah satu jalur konstitusional dan proses politik yang semestinya tetap berjalan meskipun pihak yang dipersoalkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

“Keterpilihan Wakil Presiden yang secara konstitusional menyimpang berdasarkan keputusan MK dan MA bukan masalah sederhana,” tegasnya.

Din menilai persoalan keterpilihan wakil presiden tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek konstitusional, tetapi juga menyangkut etika, moral, hingga dugaan tindak pidana.

“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang, maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” katanya.

Lebih lanjut, Din menyoroti dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir yang menurutnya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memegang kendali pemerintahan.

Ia mengibaratkan posisi Prabowo seperti seorang panglima pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad, yang tetap memiliki kendali kuat terhadap situasi.

Din menduga, mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden tidak terlepas dari restu Prabowo.

Ia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Puan dan Pramono Masuk Bursa Pengganti Gibran, PDIP: Hal-hal Strategis Ditetapkan Ibu Ketum

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.31 WIB

BANDA ACEH -Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya menyerahkan keputusan strategis Partai kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap Politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Menanggapi posisi Wakil Presiden yang kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur, Hasto kembali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah kewenangan Ketua …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Brigjen TK Diperiksa Propam Polri, Ini Perkembangan Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.40 WIB



BANDA ACEH - Divisi Propam Polri memeriksa Brigjen TK terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keterangan perwira tinggi tersebut juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara itu.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).

Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap Brigjen TK tidak hanya dilakukan melalui mekanisme propam. Keterangannya juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Selamat Ginting: Listyo Sigit Berpotensi Dibunuh

Oleh Redaksi · 15 Nov, 11.28 WIB



Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. FOTO/Ilustrasi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Keselamatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat ini dinilai berada dalam bahaya besar.

Pengamat Politik dan militer UNAS, Selamat Ginting, melontarkan peringatan keras bahwa Listyo berpotensi menjadi target pembunuhan demi menutupi jejak kejahatan tokoh-tokoh penting lainnya.

Dalam sebuah tayangan yang diakses pada Sabtu (14/11/2026), Selamat menilai bahwa Listyo memegang rahasia krusial yang bisa menyeret pihak-pihak lain yang diduga sebagai otak kejahatan.

Oleh karena itu, ia mendesak agar Listyo segera dipindahkan dari otoritas kepolisian menuju fasilitas militer yang jauh lebih aman.

“Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim atau Brimob, taruh saja di tahanan Guntur, tahanan super ekstra ketat. Mengapa ini pentingnya? Karena dia berpotensi dibunuh,” kata Selamat memperingatkan.

Saking mendesaknya situasi tersebut, Selamat meminta agar evakuasi penahanan itu dilakukan tanpa menunda waktu.

“Kalau bisa hari ini juga pindahkan saja ke penjara di Guntur itu. Di bawah polisi militer super ketat,” ujarnya.

Lebih jauh, Selamat juga pesimistis terhadap kinerja penyidik internal kepolisian dalam mengusut kasus ini secara tuntas dan cepat.

“Saya nggak yakin penyidik-penyidik Bareskrim Polri itu akan mampu secepat ini. Buktinya satu pekan nggak selesai,” katanya menyoroti lambannya progres penyelidikan.

Menurut Selamat, kasus ini telah melampaui batas hukum sipil biasa dan mulai menyentuh ranah intelijen negara.

Ia mengingatkan kembali pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai adanya indikasi mata-mata dalam pusaran kasus ini, sehingga pelibatan BIN, Badan Intelijen Strategis (BAIS), serta kejaksaan menjadi sangat wajib.

“Kan sudah cukup. Pernyataan juga dari Kepala BIN bahwa ini terindikasi mata-mata. Maka BAP-nya harus juga diperiksa oleh semua,” ujarnya.

Ia pun menyarankan agar penanganan perkara ini ditarik ke mekanisme peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer, mengingat kasusnya sudah merambat pada urusan keamanan tingkat tinggi.

“Ini juga menyangkut militer. Yang jaga presiden kan militer. Ini jadi urusannya bisa pertahanan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tapi pertahanan keamanan negara,” tuturnya.

NASIONAL

Dedi Mulyadi Sayangkan Foto Gibran Diturunkan

Oleh Redaksi · 15 Nov, 08.18 WIB



BANDA ACEH -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Terlebih, foto tersebut tidak hanya diturunkan, tetapi juga diletakkan dalam posisi terbalik di atas kursi.Dedi menilai tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan di lingkungan lembaga pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa ruang Banggar merupakan fasilitas pemerintahan yang digunakan DPRD bersama pihak eksekutif untuk membahas berbagai persoalan dan mengambil keputusan.

Pernyataan itu disampaikan Dedi melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Sabtu (14/11/2026).

Menurut Dedi, penurunan foto yang berada di lingkungan kantor pemerintahan seharusnya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan dan mendapat penugasan resmi.

Ia juga mempertanyakan tindakan pihak-pihak yang menurunkan foto Gibran, membalikkannya, kemudian membiarkannya begitu saja. Apalagi, aksi tersebut disebut berlangsung dalam suasana penuh euforia.

Karena itu, Dedi meminta pihak-pihak yang terlibat, baik kelompok masyarakat maupun kalangan aktivis, memberikan penjelasan kepada publik mengenai tindakan tersebut.

Dedi menegaskan, kebebasan menyampaikan aspirasi dalam sistem demokrasi harus disertai tanggung jawab. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan sikap, tetapi tetap harus memperhatikan etika serta cara yang beradab.

"Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," ujar Dedi.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan dan kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan norma dan tanggung jawab.

Dedi berharap peristiwa penurunan foto Gibran di ruang Banggar DPRD Jabar dapat menjadi bahan evaluasi bersama.

Dengan begitu, kehidupan demokrasi dapat terus berkembang secara terbuka tanpa meninggalkan nilai kesantunan, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

EKONOMI

Akun SSCASN CPNS 2026 Resmi Dibuka, Begini Syaratnya!

Oleh Syarifudin Brutu · 14 Nov, 23.17 WIB

Peluang emas bagi masyarakat yang mendambakan status sebagai aparatur sipil negara akhirnya tiba melalui pembukaan rekrutmen pegawai negeri sipil tahun ini. Pemerintah secara proaktif merancang agenda penerimaan tenaga kerja baru yang dijadwalkan bergulir mulai bulan kesebelas tahun 2026.

Merujuk informasi dari kalangan internal pendidikan, Badan Kepegawaian Negara secara resmi mengonfirmasi bahwa seluruh peminat sudah diizinkan melangsungkan proses registrasi profil digital lebih awal. Kebijakan ini dihadirkan agar peserta bisa mencicil persiapan sebelum pengumuman detail mengenai lini masa pendaftaran serta rincian formasi diluncurkan ke publik.

Portal registrasi tersebut berfungsi sebagai gerbang utama bagi setiap individu yang ingin mengadu nasib dalam seleksi abdi negara. Melalui platform terpusat ini, para pendaftar nantinya diwajibkan memasukkan data pribadi, memilih posisi pekerjaan yang diincar, serta mengunggah berkas-berkas administratif secara digital.

"Segera Dibuka! Seleksi CASN 2026. Pembuatan akun sudah dibuka sscasn.bkn.go.id," demikian bunyi seruan tertulis yang disiarkan langsung melalui saluran resmi instansi kepegawaian pada Sabtu, 14 November 2026.

Lantas, perangkat apa saja yang harus dipersiapkan serta bagaimana tahapan teknis untuk merampungkan registrasi profil digital tersebut?

Sebelum mengakses laman registrasi, setiap kandidat diwajibkan mengumpulkan berkas serta informasi personal berikut guna memperlancar pengisian data:

• Identitas nama lengkap yang selaras dengan Kartu Tanda Penduduk.
• Keterangan titik serta waktu kelahiran merujuk dokumen identitas resmi.
• Angka unik Nomor Induk Kependudukan.
• Kode digit resmi Nomor Kartu Keluarga.
• Dokumen fisik Kartu Tanda Penduduk.
• Saluran komunikasi berupa nomor telepon seluler aktif.
• Alamat surat elektronik pribadi yang dapat diakses.
• Berkas visual berupa pasfoto formal maupun swafoto mutakhir.
• Bukti kelulusan berupa ijazah atau transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir.

Ikuti urutan prosedur operasional berikut untuk merampungkan pembuatan profil pada portal seleksi nasional:

• Kunjungi situs resmi portal layanan terpadu melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id.
• Cari dan klik menu berlabel "Buat Akun" untuk mengawali tahapan pendaftaran.
• Masukkan seluruh elemen identitas diri secara rinci, mencakup nama sahih, NIK, nomor keluarga, jenis kelamin, informasi lahir, domisili, kontak seluler, hingga surel.
• Masukkan kode verifikasi keamanan atau captcha yang muncul di layar monitor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sekda Aceh Barat Ajak Pemuda Tolak Politik Transaksional

Oleh Biro Meulaboh · 14 Nov, 17.08 WIB

MEULABOH– Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, mewakili Bupati Aceh Barat membuka kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemuda yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Aula Cabang Dinas Pendidikan setempat, Sabtu (14/11/2026).

Dalam sambutannya, Kurdi menegaskan pendidikan politik penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang demokrasi sekaligus membangun kesadaran politik yang sehat, cerdas, dan berintegritas.

Menurutnya, demokrasi bukan sekadar proses pemilihan atau perolehan suara, melainkan harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas demi melahirkan kepemimpinan serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Ia mengingatkan generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar menggunakan hak pilih secara bijak dan tidak mudah terpengaruh ajakan orang lain maupun imbalan sesaat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis hingga Mantan Panglima TNI Hadiri Pemakaman Rizal Fadillah Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.35 WIB



BANDA ACEH - Suasana duka menyelimuti pemakaman Muhammad Rizal Fadillah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Astana Anyar, Kota Bandung, Sabtu (14/11/2026) pagi. Aktivis sekaligus Pengamat Politik yang menjadi tersangka dalam kasus terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) di usia 66 tahun.

Jenazah almarhum diantar keluarga, kerabat dan sejumlah tokoh untuk dimakamkan di TPU Astana Anyar. Sejumlah tokoh nasional turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan dan isu Politik tersebut.

Rizal mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga dan rekan-rekan seperjuangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Arus Spirit 212 Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres Prabowo

Oleh Redaksi · 15 Nov, 09.21 WIB



BANDA ACEH -Arus Spirit 212 dipastikan memberikan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.

Dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan kontribusi Sufmi Dasco Ahmad dalam perjuangan membela ulama dan umat, khususnya sejak 2019 hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) yang juga Mujahid 212, Novel Bamukmin. Ia mengaku telah menjadi kader Dasco selama belasan tahun dan menyaksikan langsung dedikasi serta kiprah politikus Partai Gerindra tersebut.

"Saya selaku kader dari beliau yang sudah belasan tahun, sangat jelas dedikasinya dalam menjalankan tugas negara penuh tanggung jawab dan tegas menghalau kemudhoratan dan perjuangan membela ulama dan umat yang terzalimi khususnya dari 2019 sampai sekarang, dan saya berada di dalamnya bersama beliau," kata Novel kepada RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Novel, kontribusi Dasco dalam perjuangan umat Islam, terutama melalui gerakan 212, sangat nyata. Ia menyebut Dasco tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk advokasi, tetapi juga membantu menyuksekan berbagai kegiatan yang digelar oleh gerakan tersebut.

"Terutama kiprah beliau dalam 212 sangat nyata dan hanya beliau yang sangat memberikan kontribusi perjuangan untuk ulama dan umat baik advokasi maupun mensuport acara acara 212," ujarnya.

Novel juga menyoroti peran Dasco dalam momentum Pilpres 2019. Menurut dia, besarnya massa yang menghadiri kegiatan di Gelora Bung Karno (GBK) merupakan salah satu bukti kontribusi maksimal Dasco terhadap perjuangan 212.

"Bahkan paling fenomenal Pilpres 2019 lautan manusia di GBK adalah peran maksimal beliau terhadap 212 membuat ulama dan umat menjadi raja dalam perhelatan Akbar," tuturnya.

Selain itu, Novel mengingatkan kembali momentum Reuni 212 pada 2018 yang disebutnya menjadi salah satu perhelatan dengan jumlah massa terbesar dalam sejarah Indonesia.

"Dan jangan lupa reuni 212 tahun 2018 massa terbanyak di Indonesia dalam sejarahnya sampai kurang lebih 13 juta orang tak lain salah satu bang Dasco memberikan kontribusi," pungkas Novel.

ACEH

Gagas Beut Kitab Bak Sikula, Bupati Aceh Besar Syech Muharram Raih Penghargaan SMSI Awards 2026

Oleh Redaksi · 14 Nov, 17.11 WIB



BANDA ACEH, ACEH BESAR – Komitmen memperkuat pendidikan agama bagi generasi muda melalui program Beut Kitab Bak Sikula mengantarkan Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris atau yang dikenal dengan sapaan Syech Muharram, meraih penghargaan dalam ajang SMSI Aceh Besar Awards 2026.

Syech Muharram menerima penghargaan kategori “Anugerah Pencetus Program Beut Kitab Bak Sikula” sebagai bentuk apresiasi atas gagasan menghadirkan pembelajaran kitab dan penguatan ilmu agama Islam di lingkungan sekolah.

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua SMSI Provinsi Aceh, Aldin NL, didampingi Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, dalam acara yang berlangsung di The Pade Hotel, Aceh Besar, Sabtu (14/11/2026).

Penganugerahan itu menjadi salah satu agenda dalam rangkaian pelantikan Pengurus SMSI Aceh Besar Masa Bakti 2026–2029 yang turut dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Program Beut Kitab Bak Sikula merupakan gagasan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memperkuat fondasi keagamaan peserta didik melalui pembelajaran kitab di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu jam pada awal aktivitas sekolah, sebelum dimulainya proses pembelajaran reguler.

Tidak sekadar menambah pengetahuan agama, program tersebut diarahkan untuk membekali siswa dengan pemahaman ilmu fardu ain, dasar-dasar ajaran Islam, serta nilai-nilai adab dan akhlak yang menjadi fondasi dalam kehidupan sehari-hari.

Syech Muharram mengatakan, pendidikan agama harus menjadi bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Ia berharap sekolah tidak hanya melahirkan anak-anak yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat dan berakhlak mulia.

“Kami ingin seluruh anak Aceh Besar memahami ilmu agama dengan baik. Kita berharap dari sekolah-sekolah ini lahir pemimpin masa depan, baik pemimpin bangsa, daerah, maupun umat yang memiliki dasar agama kuat,” ujar Syech Muharram.

Menurutnya, penguatan pendidikan keagamaan merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang memiliki pengetahuan, akhlak, dan landasan agama yang kuat diharapkan mampu menjadi penerus pembangunan daerah sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman di tengah perubahan zaman.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Percepat Pemulihan Layanan Air Bersih Pascabencana, Hutama Karya Kebut Pembangunan SPAM di Aceh Tamiang

Oleh Redaksi · 14 Nov, 21.35 WIB



BANDA ACEH, ACEH TAMIANG – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kuala Simpang dan SPAM Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan infrastruktur dasar pascabencana hidrometeorologi.

Saat ini, pekerjaan pada kedua sistem tersebut berfokus pada instalasi bangunan pengolah air, pembangunan bangunan operasional, serta pembangunan reservoir untuk mendukung pemulihan dan peningkatan kapasitas layanan air bersih bagi masyarakat.

Pembangunan SPAM Kuala Simpang mencakup penyediaan unit pengolah air baru berkapasitas 50 LPD. Sementara itu, pada SPAM Rantau, pekerjaan meliputi pembangunan unit pengolah air baru berkapasitas 20 LPD serta rehabilitasi SPAM eksisting dengan kapasitas 40 LPD.

Pengembangan tersebut dilakukan untuk memulihkan fungsi infrastruktur penyediaan air minum sekaligus meningkatkan kapasitas layanan di wilayah terdampak.

Sebelumnya, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada infrastruktur SPAM Kuala Simpang dan SPAM Rantau sehingga keduanya tidak dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

SPAM Kuala Simpang yang sebelumnya memiliki kapasitas 30 LPD dan SPAM Rantau dengan kapasitas 40 LPD mengalami gangguan fungsi akibat dampak bencana. Kondisi tersebut mendorong perlunya penanganan melalui pembangunan unit pengolahan baru serta rehabilitasi fasilitas eksisting agar layanan air bersih dapat kembali dipulihkan.

Pada SPAM Kuala Simpang, pekerjaan saat ini meliputi instalasi bangunan pengolah air berkapasitas 50 LPD, pembangunan bangunan operasional, serta pembangunan reservoir berkapasitas 850 meter kubik (m^3).

Sementara itu, pada SPAM Rantau, pekerjaan mencakup instalasi bangunan pengolah air berkapasitas 20 LPD, pembangunan bangunan operasional, serta pembangunan reservoir berkapasitas 350 m^3.

Penyelesaian fasilitas pengolahan dan infrastruktur pendukung tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sistem agar dapat beroperasi dan mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya menghadapi sejumlah tantangan, terutama kondisi cuaca ekstrem dan rantai pasok …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolda Jabar Hengki: Saya Tidak Butuh Polantas Sibuk Kosongkan Jalan Saat Pimpinan Melintas

Oleh Redaksi · 14 Nov, 13.45 WIB

BANDA ACEH -Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa anggota polisi lalu lintas (Polantas) harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sibuk mengatur arus kendaraan demi kelancaran perjalanan pejabat atau pimpinan yang melintas.

Penegasan tersebut disampaikan Hengki saat memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026.

Di hadapan jajaran lalu lintas, Hengki secara tegas mengingatkan bahwa keberhasilan anggota Polantas tidak boleh diukur dari kemampuan mereka mengosongkan jalan ketika Kapolda atau pimpinan lainnya melintas.

“Saya tidak butuh anggota yang sibuk mengatur lalu lintas hanya karenA Kapolda melintas. Saya butuh anda hadir untuk melayani masyarakat di jalan raya,” tegas Hengki dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas pada hari Kamis …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

WNI yang Jadi Tentara Bayaran Rusia Ternyata Pengangguran hingga Mantan Admin Judol di Kamboja

Oleh Redaksi · 14 Nov, 15.30 WIB

BANDA ACEH - Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa belasan warganya pergi ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Parahnya, mereka bahkan sama sekali tidak memiliki rekam jejak di dunia kemiliteran maupun kepolisian, melainkan warga sipil biasa mulai dari pengangguran hingga mantan admin judi online (judol).Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol. Nasriadi menjelaskan bahwa para korban umumnya merupakan masyarakat yang tengah terhimpit kesulitan ekonomi. Sindikat sengaja menyasar warga berusia produktif di bawah 50 tahun yang sedang membutuhkan pekerjaan.

"Mereka rata-rata mantan admin judi online di luar negeri, contohnya di Kamboja. Selain itu, ada yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas. Jadi sama sekali tidak ada yang berbasis militer atau polisi," ungkap Nasriadi dikutip Sabtu (14/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

4 BERITA

LINGKUNGAN

Pemkab Pandeglang Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Sebut soal Ikon Daerah

Oleh Van · 15 Nov, 16.38 WIB



Momen langka seekor badak Jawa tertangkap kamera pemantau di habitat aslinya.

BANTEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menilai wacana pemindahan satwa langka tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup badak Jawa.

Selain persoalan konservasi, Iing menyebut keberadaan badak Jawa memiliki nilai penting bagi masyarakat Pandeglang.

Pasalnya, satwa endemik Indonesia tersebut selama ini menjadi ikon dan kebanggaan daerah yang identik dengan kawasan Ujung Kulon.

"Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah," ujar Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Iing, pemerintah pusat tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan terkait pemindahan badak bercula satu tersebut.

Ia meminta agar rencana translokasi dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan melibatkan para ahli ekologi dan pihak-pihak terkait.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah risiko kegagalan adaptasi badak Jawa ketika dipindahkan ke habitat baru.

Terlebih, pemindahan dari Ujung Kulon menuju Alas Purwo melibatkan perjalanan jarak jauh dengan kondisi lingkungan yang berbeda.

Kematian Badak Musofa Jadi Bahan Evaluasi

Dalam kesempatan yang sama Iing juga menyoroti pengalaman pemindahan badak Jawa bernama Musofa pada November 2025.

Badak tersebut dipindahkan ke fasilitas Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, Musofa dinyatakan mati dua hari setelah proses pemindahan.

Peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah menjalankan rencana translokasi berikutnya.

"Logika sederhananya, proses translokasi lokal saja berisiko gagal, apalagi pemindahan jarak jauh lintas daerah," ungkapnya.

Sebelumnya, wacana pembangunan habitat baru badak Jawa di Alas Purwo disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki.

Rencana tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan populasi badak Jawa yang saat ini hanya ditemukan di kawasan Ujung Kulon, sehingga disebut rentan terdampak aktivitas vulkanik.(*)

OPINI

Ketika Rasio Melayani Identitas: Membaca Loyalitas Pendukung Jokowi

Oleh Lukman Nul Hakim · 14 Nov, 14.10 WIB

Oleh: Dr. Lukman Nul Hakim((Dr. Lukman Nul Hakim adalah ilmuwan psikologi dan pengajar kepemimpinan dan manajemen pendidikan))

AMIS, 12 November 2026, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Ia menjadi wakil presiden pertama sejak Reformasi 1998 yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai.

Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menganulir keabsahan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengahnya, yang ia tempuh di luar negeri. Padahal, dokumen itu merupakan syarat pencalonan wakil presiden. Wacana pemakzulan pun mulai bergulir di parlemen. Dalam pernyataan perpisahannya, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan ijazah, dan seluruh dokumen pendidikannya lengkap.

Menurut saya, peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai nasib seorang Gibran. Gibran merupakan representasi "geng Solo", yaitu jejaring keluarga, relawan, dan loyalis yang tumbuh bersama karier politik Joko Widodo sejak ia menjadi wali kota Solo, lalu ikut naik ke panggung nasional. Jalan Gibran ke kursi wakil presiden pun dibuka oleh Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat usia, ketika MK dipimpin Anwar Usman, ipar Jokowi, yang belakangan dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Dari Balai Kota Solo ke Istana, perjalanan Gibran memperlihatkan bagaimana kekuasaan keluarga dirawat dan diwariskan.

Saya mengira publik akan menimbang ulang dukungannya kepada "geng Solo" setelah serangkaian kontroversi selama satu dekade terakhir, seperti revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah, UU Cipta Kerja yang sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, hingga Ibu Kota Nusantara yang kajian lingkungannya baru disusun setelah keputusan politik diambil. Kereta cepat Whoosh, yang semula dijanjikan tanpa uang negara, kini meninggalkan utang lebih dari Rp116 triliun, dan pemerintah mulai menimbang APBN untuk menanggungnya. Bandara Kertajati bahkan diakui pemerintah sendiri sebagai proyek gagal karena sepi penumpang. Puncaknya, putusan MK tentang syarat usia mengubah tafsir UU Pemilu dan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, semua itu nyaris tidak menggerus kecintaan banyak warga kepada Jokowi dan keluarganya.

Hal ini tampak jelas di kolom komentar unggahan Instagram Narasi Newsroom yang berjudul "Gibran: Keputusan Mundur Ini Tidak Berkaitan dengan Ijazah".

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Jalan Paya Balok Disiapkan Jadi Jalur Alternatif Saat Banjir

Oleh Biro Meulaboh · 15 Nov, 16.18 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama jajaran meninjau kondisi Jalan Paya Balok di Desa Seumuleng, Kecamatan Bubon,FOTO/HAI

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM meninjau kondisi Jalan Paya Balok di Desa Seumuleng, Kecamatan Bubon, Minggu (15/11/2026). Jalan tersebut menjadi jalur alternatif bagi masyarakat saat Jalan Ateung Teupat yang menghubungkan Kecamatan Bubon dan Woyla terendam banjir.

Dalam peninjauan tersebut, Tarmizi didampingi Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, camat, dan keuchik setempat.

Tarmizi mengatakan, Jalan Ateung Teupat merupakan ruas jalan yang telah lama menjadi langganan banjir. Namun, penanganannya terkendala kewenangan karena berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil perencanaan atau Detail Engineering Design (DED), penanganan jalan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar.

"Pemerintah Provinsi Aceh saat ini tidak memiliki anggaran sebesar itu untuk menangani satu titik jalan, sementara masih banyak ruas jalan lain di seluruh Aceh yang membutuhkan penanganan," kata Tarmizi.

Sebagai solusi sementara, Pemkab Aceh Barat memanfaatkan Jalan Paya Balok untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat ketika Jalan Ateung Teupat terendam banjir.

Menurut Tarmizi, jalan alternatif tersebut telah selesai dibangun tahun lalu. Namun, masih terdapat sekitar 35 meter ruas jalan yang mengalami kendala dan perlu segera ditangani.

"Dalam waktu dekat akan kita lakukan penanganan darurat terlebih dahulu. Nantinya menggunakan batang kelapa yang ditimbun agar jalan bisa dilalui masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Aceh Barat akan mengupayakan penanganan secara permanen terhadap ruas Jalan Paya Balok pada tahun depan agar akses penghubung Kecamatan Bubon dan Woyla dapat berfungsi lebih optimal.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

ACEH

Aceh Barat Usulkan Jalan Ateung Teupat Jadi Jalan Nasional

Oleh Biro Meulaboh · 14 Nov, 14.58 WIB

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat terus mengupayakan penanganan Jalan Ateung Teupat di jalur Meulaboh–Kuala Bhee yang kerap terendam banjir saat musim hujan. Untuk merealisasikan pembangunan ruas jalan tersebut, dibutuhkan anggaran hampir Rp100 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., mengatakan dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) pembangunan jalan tersebut telah tersedia. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran.

Hal itu disampaikan Kurdi saat menjawab pertanyaan anggota DPRK Aceh Barat dalam Rapat Paripurna Ke-VII Masa Sidang Ke-III Tahun 2026 terkait pembahasan dan penetapan Rancangan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027, Jumat (13/11/2026).

Menurut Kurdi, persoalan Jalan Ateung Teupat telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masuk dalam pembahasan induk kebencanaan bersama Bappeda Aceh serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Meski perencanaan teknis telah rampung, dukungan anggaran belum memenuhi kebutuhan yang diusulkan. Karena itu, diperlukan dorongan politik agar penanganan jalan tersebut mendapat persetujuan dan dukungan pendanaan yang memadai.

"Dari segi efektivitas penanganan sebenarnya cukup efektif. Namun, anggaran yang tersedia belum memenuhi pagu yang kita usulkan. Karena itu, diperlukan dorongan yang lebih kuat, terutama melalui keputusan politik, mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar," ujar Kurdi.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat juga mengusulkan peningkatan status Jalan Ateung Teupat, yang memiliki panjang sekitar dua kilometer, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Kurdi menyebutkan, Gubernur Aceh telah menyurati Bappenas terkait usulan tersebut. Koordinasi dengan Kepala Bappenas juga telah dilakukan untuk membahas percepatan perubahan status jalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Longsor Tutup Total Jalur Bukittinggi-Maninjau di Agam, Mobil Nyaris Tertimbun

Oleh Redaksi · 15 Nov, 11.43 WIB



BANDA ACEH - – Bencana tanah longsor menerjang ruas jalan provinsi penghubung Bukittinggi–Maninjau, tepatnya di Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (14/11/2026).

Timbunan material tanah menutup seluruh badan jalan hingga menyebabkan akses lalu lintas terputus total dan sempat menimpa satu unit mobil sedan yang sedang melintas.

Berdasarkan laporan di lapangan, peristiwa longsor terjadi sebanyak dua kali pada Sabtu (14/11/2026). Longsor pertama terjadi sekitar pukul 18.15 WIB, sebelum kemudian disusul longsor susulan dengan volume material jauh lebih besar pada pukul 20.30 WIB.

Pada saat longsor susulan terjadi malam hari, sebuah mobil sedan merek Hyundai bernomor polisi BH 1976 NR yang melaju dari arah Matur menuju Padang Luar, Bukittinggi, sempat tertimpa material tanah. Beruntung, kendaraan tersebut hanya terkena sebagian guguran material sehingga tidak mengalami kerusakan berarti dan pengemudi selamat. Usai kejadian, pengendara memilih membatalkan perjalanan dan memutar balik ke arah Matur.

Petugas di lokasi kejadian memperkirakan panjang badan jalan yang tertimbun material longsor mencapai sekitar 20 meter dengan ketinggian tumpukan tanah menyentuh 5 meter. Kondisi tersebut membuat jalur utama tidak dapat dilalui oleh kendaraan.

Bhabinkamtibmas Nagari Sungai Landia, Aiptu Atma Putra, mengimbau para pengendara, khususnya kendaraan roda empat, untuk tidak memaksakan diri melintas dan segera beralih menggunakan jalur alternatif.

"Diperkirakan roda empat tidak bisa melewati karena melihat kondisi longsor timbunannya sangat tinggi. Kami juga mengimbau kepada pengemudi roda empat untuk mencari jalan alternatif," ujar Aiptu Atma Putra dalam keterangannya.

Proses pembersihan material longsor sempat terkendala akibat guyuran hujan yang masih melanda kawasan perbukitan tersebut sejak Sabtu malam. Memasuki Minggu (15/11/2026) pagi, alat berat telah diturunkan ke titik lokasi untuk menyingkirkan gundukan tanah yang menutup badan jalan.

Hingga kini, personel gabungan dari Polri dan TNI bersama warga setempat masih bersiaga di sekitar area bencana guna mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi potensi longsor susulan.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra saat berkendara di jalur rawan bencana, terutama ketika curah hujan tinggi masih berlangsung

LINGKUNGAN

Banjir Terjang Babahrot Abdya, Ketinggian Air Sepinggang

Oleh Syarifudin Brutu · 15 Nov, 00.02 WIB



Suasana banjir yang kembali melanda kawasan Gampong Ie Mirah, Babahrot, Aceh Barat Daya pada Sabtu malam, 14 November 2026 pukul 20:20 WIB. — (Dok. Istimewa / Tangkapan layar

BABAHROT — Hujan deras tanpa henti yang mengguyur kawasan hulu memicu melubernya aliran sungai hingga merendam permukiman warga di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pada Sabtu malam, 14 November 2026.

Intensitas curah hujan yang tinggi membuat volume air sungai meluap secara drastis dengan arus yang sangat keruh dan membahayakan. Berdasarkan pantauan di lapangan, tinggi genangan air di lokasi kejadian bahkan telah mencapai ukuran sepinggang orang dewasa, memaksa warga setempat untuk meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi demi menghindari risiko fatal bagi keselamatan jiwa.

Sebelum musibah malam ini terjadi, wilayah Kecamatan Babahrot dan sekitarnya sebenarnya sudah pernah menghadapi ujian serupa. Pada Senin, 9 November 2026 lalu, hantaman luapan air sempat menerjang Gampong Pante Rakyat serta Gampong Ie Mirah di Babahrot, ditambah Gampong Alue Padee di Kecamatan Kuala Batee. Peristiwa tersebut menyebabkan kurang lebih 10 unit rumah warga mengalami dampak kerusakan serta merendam akses ruas jalan nasional.

Merespons situasi darurat yang kian eskalatif ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya secara tegas meminta masyarakat agar senantiasa siaga penuh. Langkah antisipasi tersebut sejalan dengan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh yang diketok oleh Gubernur Muzakir Manaf, terhitung sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Abdya, Mukhsin ST, memberikan instruksi langsung kepada segenap warga yang tinggal di zona rawan bencana agar mewaspadai potensi susulan berupa banjir gelombang berikutnya, ancaman tanah longsor, terjangan angin kencang, serta anomali cuaca ekstrem lainnya. Pihaknya juga meminta masyarakat aktif memantau kanal informasi peringatan dini resmi dari instansi pemerintah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Bagi para pengemudi maupun pengguna kendaraan bermotor yang hendak melintasi jalur lintas nasional kawasan Babahrot, diimbau untuk mengurangi kecepatan dan menunda perjalanan jika hujan lebat kembali turun demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di tengah naiknya debit air sungai secara berkala.(*)look

ACEH

Musriadi Dorong Pemko Banda Aceh Susun Qanun Perlindungan Anak dan Perempuan

Oleh Redaksi · 14 Nov, 22.17 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh membutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif. Wakil Ketua DPRK Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun qanun khusus sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.

Dorongan tersebut disampaikan Musriadi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Pertemuan berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK Jumat (13/11/2026) malam.

Menurut Musriadi, perlindungan perempuan dan anak perlu ditopang regulasi khusus agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak semata-mata bergantung pada program maupun alokasi anggaran tahunan.

Ia berharap qanun tersebut nantinya mengatur secara menyeluruh berbagai aspek perlindungan, mulai dari pencegahan kekerasan, penanganan korban, pendampingan, hingga proses pemulihan.

“Pemerintah Kota perlu menginisiasi regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini harus mengutamakan pencegahan, edukasi, pendampingan, dan pemulihan korban, bukan hanya penanganan setelah kasus terjadi,” kata Musriadi.

Ia juga meminta dinas terkait mulai menyiapkan kajian akademik serta melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan perlindungan perempuan dan anak di Banda Aceh. Kajian tersebut dinilai penting agar qanun yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

Selain aspek regulasi, Musriadi menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam APBK 2027. Menurutnya, alokasi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, edukasi keluarga, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan.

Ia menegaskan, penyusunan qanun perlindungan anak dan perempuan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Musriadi berharap inisiatif penyusunan qanun tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret, mulai dari penyusunan kajian hingga pembahasan regulasi. Dengan demikian, Banda Aceh memiliki payung hukum yang kuat sekaligus sistem perlindungan yang lebih terarah bagi perempuan dan anak.***

INTERNASIONAL

Semua Penerbangan di AS Digrounding: Muncul Klaim UFO di Media Sosial

Oleh Redaksi · 14 Nov, 16.26 WIB

BANDA ACEH - Seluruh penerbangan domestik di Amerika Serikat sempat digrounding secara nasional pada Jumat, 13 November 2026, setelah Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan perintah ground stop karena “extraordinary circumstances” dan alasan keselamatan.Perintah tersebut berlaku sekitar pukul 15.54 EST dan berlangsung lebih dari empat jam—terlama sejak serangan 11 September 2001. Ribuan penerbangan dibatalkan dan ditunda, dengan lebih dari 8.000 pembatalan dan ribuan keterlambatan menurut data FlightAware dan Flightradar24. Pesawat yang sudah di udara diizinkan mendarat, sementara penerbangan internasional ditangani secara kasus per kasus.

Menurut Sekretaris Transportasi Sean Duffy dan FAA, penyebabnya adalah gangguan telekomunikasi yang membebani sistem komunikasi air traffic control yang sudah tua (legacy system). Switch dan router dilaporkan overload sehingga data menjadi tidak konsisten. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin menegaskan tidak ada indikasi serangan atau ancaman keamanan, dan semua penerbangan sudah terhitung aman. Ground stop kemudian dicabut sekitar pukul 20.15 EST, meski dampaknya masih terasa di akhir pekan.

Di tengah kekacauan bandara, sejumlah unggahan di platform seperti X (Twitter) dan forum online mulai menyebarkan klaim bahwa grounding terkait dengan penampakan UFO atau UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Beberapa video viral menampilkan objek terbang tidak dikenal di atas kota atau bandara, termasuk klaim penampakan “armada UAP” di New York yang dikaitkan dengan penghentian penerbangan.

Namun, klaim tersebut tidak didukung bukti resmi. Fact-check dan laporan otoritas penerbangan menyebut tidak ada koneksi antara gangguan ATC dengan penampakan UFO. Insiden serupa di masa lalu (seperti penampakan di O’Hare 2006 atau laporan pilot di New Mexico) biasanya dijelaskan sebagai fenomena cuaca, drone, atau objek biasa, dan tidak pernah menyebabkan grounding nasional.

Bandara-bandara besar seperti JFK, Reagan National, dan lainnya dipenuhi penumpang yang terlantar. Maskapai seperti United, American, Delta, dan Southwest membatalkan ratusan penerbangan. Analis memperkirakan gangguan jadwal akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Sementara itu, spekulasi UFO terus beredar di media sosial, memicu diskusi antara yang percaya ada “cover-up” dan yang menilai ini hanya teori konspirasi biasa di tengah masalah teknis sistem ATC yang sudah lama …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

5 BERITA

INTERNASIONAL

Microsoft Bantah Gangguan Layanannya Picu Penghentian Penerbangan di AS, Ini Penjelasannya

Oleh Van · 15 Nov, 16.30 WIB



Tampilan modern kantor Microsoft dengan logo ikonik pada dinding kayu.

AMERIKA SERIKAT – Microsoft membantah gangguan layanan teknologi yang dialaminya berkaitan dengan penghentian seluruh penerbangan keberangkatan di Amerika Serikat (AS) pada Jumat (13/11/2026).

Perusahaan teknologi tersebut menegaskan tidak menemukan indikasi hubungan antara gangguan sistemnya dan masalah pada pengendalian lalu lintas udara.

Dalam pernyataannya di platform X, Sabtu (14/11/2026) Microsoft menegaskan bahwa gangguan yang terjadi pada layanannya tidak berkaitan dengan keputusan Federal Aviation Administration (FAA) menghentikan sementara penerbangan secara nasional.

"Kami tidak memiliki indikasi bahwa penghentian penerbangan secara nasional oleh FAA berkaitan dengan layanan Microsoft apa pun," tulis pihak Microsoft.

Penghentian penerbangan tersebut sebelumnya memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya serangan siber yang berkaitan dengan gangguan layanan Microsoft secara global.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin juga membantah dugaan adanya serangan siber terkoordinasi yang menyebabkan gangguan tersebut.

Dikutip dari The Guardian, Mullin mengatakan pemerintah tidak menemukan bukti yang menghubungkan kejadian tersebut dengan gangguan Microsoft maupun serangan siber terhadap infrastruktur Amerika Serikat.

"Selamat datang di hari Jumat tanggal 13, bukan? Saya ingin memastikan semua orang paham bahwa tidak ada hubungan antara kejadian ini dengan Microsoft. Saya tahu banyak orang yang langsung menarik kesimpulan seperti itu," kata Mullin.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah belum menemukan indikasi adanya pihak yang bertanggung jawab atas serangan siber.

"Biasanya, jika terjadi ancaman atau serangan siber, akan ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun, tidak ada pembicaraan apa pun mengenai hal itu. Kami juga tidak menemukan jejak apa pun," tambahnya.

Saat ini, badan keamanan dan penegak hukum AS masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab gangguan. Presiden Donald Trump juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah staf terkait kejadian tersebut.

"Presiden Trump segera mengumpulkan staf di kantornya," ujar Mullin.

Di tengah penyelidikan yang masih berlangsung, Menteri Transportasi AS Sean Duffy menyatakan ruang udara Amerika Serikat telah kembali dibuka pada Jumat malam waktu setempat.

Dilansir AFP, Sabtu (14/11/2026), Duffy mengatakan pembukaan kembali ruang udara tidak berarti seluruh penerbangan dapat langsung beroperasi normal.

"Pada pukul 8:15 malam ini Waktu Timur (Eastern Time), kami telah membuka kembali ruang udara," ujar Duffy.

"Apakah ini berarti semua penerbangan bisa langsung berangkat sekarang? Prosesnya akan berjalan lambat," lanjutnya dalam taklimat di Gedung Putih.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Polisi di AS Siaga Tinggi, Kabar Makhluk Alien Ditahan Terkait Penghentian Penerbangan Nasional

Oleh Redaksi · 15 Nov, 10.04 WIB



BANDA ACEH - Kepolisian Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan kewaspadaan di sejumlah fasilitas rahasia dan bandara utama, menyusul beredarnya kabar bahwa seorang "makhluk alien" tengah ditahan pihak berwenang. Isu ini muncul di tengah kekacauan penerbangan nasional yang melumpuhkan ribuan penerbangan sejak Jumat (13/11).Federal Aviation Administration (FAA) pada Jumat siang waktu setempat mengeluarkan perintah ground stop nasional. Semua penerbangan yang hendak lepas landas dari bandara di seluruh Amerika Serikat dihentikan selama lebih dari empat jam — terlama sejak serangan 11 September 2001. Ribuan penerbangan dibatalkan dan ditunda, dengan lebih dari 1,5 juta penumpang terdampak. Pemulihan jadwal diperkirakan baru normal menjelang akhir Minggu.

Penyebab Resmi vs Isu yang Beredar

Pemerintah AS secara resmi menyatakan gangguan disebabkan oleh masalah telekomunikasi pada sistem pengendalian lalu lintas udara yang sudah usang. Menteri Transportasi Sean Duffy menyebut kerusakan terjadi saat kontraktor L3Harris melakukan pemeliharaan rutin, yaitu penggantian kabel tembaga dengan fiber optik di salah satu fasilitas remote. Router dan switch kelebihan beban data hingga menyebabkan ketidakstabilan radar dan komunikasi.

Departemen Keamanan Dalam Negeri menegaskan tidak ada indikasi serangan siber atau ancaman keamanan. "Ini murni gangguan telekomunikasi. Masyarakat tidak dalam bahaya," kata pejabat terkait.

Namun, di media sosial dan sejumlah kanal alternatif, narasi berbeda berkembang pesat. Sejumlah akun mengklaim penghentian penerbangan dilakukan untuk mengamankan "insiden" terkait makhluk non-manusia yang dikabarkan jatuh atau ditangkap di wilayah udara Amerika. Menurut rumor yang belum terkonfirmasi, makhluk tersebut saat ini ditahan di fasilitas rahasia di bawah pengawasan bersama militer dan lembaga intelijen, sementara polisi federal dan lokal diperintahkan siaga tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan kebocoran informasi atau upaya pembebasan.

Respon Pihak Berwenang

Hingga berita ini ditulis, tidak ada pernyataan resmi dari FBI, Pentagon, atau kepolisian yang membenarkan keberadaan makhluk alien. Pejabat FAA dan Departemen Transportasi terus menekankan bahwa fokus mereka adalah pemulihan operasional penerbangan dan modernisasi sistem ATC yang sudah tua. Menteri Duffy bahkan kembali meminta anggaran hingga puluhan miliar dolar untuk upgrade infrastruktur pengendalian lalu lintas udara.

Sementara itu, maskapai besar seperti Delta, United, dan American Airlines masih membatalkan sekitar 20–25 persen penerbangan pada Sabtu, dengan JetBlue membatalkan hampir 45 persen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Ribuan Robot Perusahaan Dukungan Putra Trump Disiapkan untuk Perang di Terowongan Gaza?

Oleh Redaksi · 14 Nov, 14.58 WIB

BANDA ACEH - Sebuah perusahaan rintisan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan robot humanoid dan mendapat dukungan Eric Trump, putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tengah melakukan pembicaraan dengan militer Israel untuk memasok hingga 1.000 robot yang akan digunakan di terowongan-terowongan Gaza.Robot tersebut bahkan berpotensi dilibatkan dalam operasi tempur, demikian laporan surat kabar Inggris Financial Times, dikutip Aljazeera, Sabtu (14/11/2026).

Surat kabar tersebut mengutip pernyataan Mike LeBlanc, salah satu pendiri sekaligus CEO perusahaan Foundation Future Industries.

Ia mengatakan bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan awal dengan sejumlah pejabat tinggi militer Israel pada September lalu.

Dalam kunjungan tersebut, LeBlanc meninjau sejumlah terowongan di Gaza bersama robot buatan perusahaannya yang bernama Phantom MK1.

Ia juga mengonfirmasi kepada Financial Times bahwa perusahaannya sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, terkait pengadaan robot tersebut.

Negosiasi ini berlangsung meskipun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya pada tahun ini mengakui bahwa lebih dari 80 persen terowongan yang dibangun oleh Gerakan Perlawanan Islam Hamas telah dihancurkan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel sejak Operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023.

Surat kabar Inggris The Telegraph memperkirakan harga satu unit robot tersebut mencapai sekitar 150 ribu dolar AS.

Dengan demikian, pengadaan 1.000 unit dapat bernilai hingga 150 juta dolar AS apabila kesepakatan itu direalisasikan sesuai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Geger! Ada Paket Liburan ke Korea Cuma Seharga Rp544 Ribu

Oleh Redaksi · 14 Nov, 12.28 WIB

BANDA ACEH - Publik dihebohkan dengan maraknya penawaran murah terkait paket liburan selama lima hari ke Korea Selatan. Bagaimana tidak mengejutkan, paket ini dibanderol dengan harga sangat tidak masuk akal mulai dari US$45 (sekitar Rp816 ribu), dengan uang muka hanya CNY199 atau setara Rp544 ribu.Dikutip Sabtu (14/11/2026) China tengah dibanjiri penawaran paket liburan murah, namun harga super miring tersebut rupanya menyimpan jebakan di baliknya yang bahkan membuat turun tangan pihak dari Kedutaan Besar China di Seoul.

Menurut laporan, turis dari negara tersebut dihimbau agar cermat memilih agen perjalanan dan mewaspadai paket murah yang berujung pada pemaksaan wisata belanja hingga pemangkasan jadwal kunjungan apabila …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

KOMUNITAS

IKADAYA Banda Aceh Peringati Maulid Nabi, Santuni Anak Yatim-Piatu Asal Peudaya

Oleh Hamdani · 15 Nov, 18.48 WIB



Pengurus IKADAYA Banda Aceh bersama Camat Padang Tiji, Imum Mukim Peudaya, tokoh masyarakat, alim ulama, dan warga menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Asrama IKADAYA, Banda Aceh, Minggu (15/11/2026)

BANDA ACEH – Ikatan Kekeluargaan Peudaya (IKADAYA) Banda Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Asrama IKADAYA, Banda Aceh, Minggu (15/11/2026). Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penyantunan anak-anak yatim-piatu asal Kemukiman Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang saat ini berdomisili di Banda Aceh.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum IKADAYA Banda Aceh, Ir. Ibnu Hajar, S.T., IPM., Imum Mukim Peudaya, Tgk. Ramli Daud, S.Ag., Camat Padang Tiji, Khalidin, ST, para keuchik se-Kemukiman Peudaya, Ketua Pemuda, alim ulama, serta tokoh masyarakat asal Peudaya yang berdomisili di Banda Aceh maupun yang datang langsung dari kampung halaman.

Turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut Camat Padang Tiji, Khalidin, ST, Dr. Iqbal Muhammad yang mewakili tokoh masyarakat asal Peudaya yang berdomisili di Banda Aceh, serta Drs. H. Fakhruddin Amin yang menyampaikan sambutan mewakili tokoh masyarakat dari kampung.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan sambutan Ketua Umum IKADAYA Banda Aceh, Imum Mukim Peudaya, Camat Padang Tiji, serta perwakilan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Ibnu Hajar menyampaikan rasa syukur atas kesempatan berkumpul dalam suasana kebersamaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia mengajak seluruh warga IKADAYA menjadikan momentum Maulid sebagai sarana meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlak dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat silaturahmi, menjaga persaudaraan, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari," ujar Ibnu Hajar.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut IKADAYA juga ingin terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, salah satunya melalui penyantunan anak-anak yatim-piatu asal Kemukiman Peudaya yang berdomisili di Banda Aceh.

"Kami berharap perhatian dan kepedulian seperti ini dapat terus terpelihara sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap sesama warga. Kami juga berharap IKADAYA ke depan semakin solid, berkembang, dan mampu menjadi wadah pemersatu serta tempat berhimpunnya generasi muda Peudaya untuk saling mendukung, meningkatkan kapasitas diri, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah," tambahnya.

Sementara itu, Imum Mukim Peudaya, Tgk. Ramli Daud, S.Ag., dalam sambutannya turut mengulas sejarah perjalanan IKADAYA sejak awal berdiri hingga perkembangannya sebagai wadah pemersatu masyarakat Peudaya di Banda Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Link Video Ce Crystine Viral, Pasutri Produksi Konten Vulgar Raup Rp 400 Juta!

Oleh Redaksi · 15 Nov, 10.58 WIB



BANDA ACEH - Warganet di berbagai platform media sosial tengah ramai memburu link video Ce Crystine viral di X. Nama panggung perempuan tersebut mencuat ke publik setelah polisi meringkusnya bersama sang suami atas dugaan produksi dan penjualan konten pornografi.Pasangan suami istri berinisial K (38) alias Ce Crystine dan PEK (40) ini berasal dari Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jajaran Satreskrim Polres Blitar Kota menangkap keduanya di sebuah rumah kos di Kota Denpasar, Bali.

Awal Mula Terbongkarnya Kasus

Kasus ini bermula saat tim patroli siber Satreskrim Polres Blitar Kota menemukan unggahan video asusila pada sebuah situs web. Video tersebut mengambil latar di salah satu penginapan di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Berbekal temuan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga berhasil melacak keberadaan kedua pelaku di Bali.

"Setelah kami lakukan penyelidikan, pelaku warga Kabupaten Blitar dan berdomisili di Kota Denpasar. Anggota kemudian melakukan penangkapan di rumah kos pelaku di Denpasar. Kedua pelaku ini pasangan suami istri," kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo.

Pembagian Peran dan Tarif Berlangganan

Selama menjalankan bisnis terlarang sejak Maret 2025 hingga November 2026, kedua tersangka menerapkan pembagian peran yang rapi. Sang suami, PEK, menggagas ide sekaligus mendaftarkan akun media sosial serta situs berlangganan memakai identitas istrinya.

"Tersangka PEK menemukan adanya sosial media pada website. Mempunyai ide untuk membuat video bermuatan pornografi dan di-upload pada akun di website. Melakukan pendaftaran akun di website dengan menggunakan identitas K," jelas Kalfaris.

Sementara itu, K alias Ce Crystine merekam foto dan video menggunakan ponsel serta tripod. Ia juga aktif menggelar siaran langsung (live streaming) di media sosial untuk menarik minat pengikut.

Mereka mengunggah konten baru minimal dua kali dalam sepekan. Pengguna internet tidak bisa mengakses tayangan tersebut secara gratis, melainkan harus membayar biaya berlangganan lebih dulu.

"Foto atau video tersebut dapat dilihat oleh pengikut atau follower yang telah berlangganan dengan biaya setiap bulan sebesar 10 USD atau untuk saat ini kurang lebih sebesar Rp 181 ribu," tutur Kalfaris.

Omzet Mencapai Rp 400 Juta

Melalui skema berlangganan itu, pasangan ini meraup penghasilan fantastis berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per bulan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Sepertinya Jokowi dan Gibran Mulai Memainkan Strategi Blankon?

Oleh Redaksi · 14 Nov, 12.33 WIB

Oleh: Rosadi Jamani((Penulis adalah Ketua Satu Pena Kalimantan Barat))

IBRAN end game alias tamat. Pembela garis kerasnya Andi Azwan dan Ade Darmawan pun pindah tuan. Mestinya Gibran dan Jokowi menjadi oposisi, nyata malah makin mendukung Prabowo.

Apakah ayah dan anak ini sedang memainkan Strategi Blankon?

Simak ulasannya sambil seruput Koptagul, wak!

Inilah manuver Politik menarik untuk dibedah.

Setelah Gibran ditendang dari istana, Jokowi dan putranya justru menyatakan tetap mendukung Prabowo.

Gibran bahkan meminta para pendukungnya mengawal pemerintahan Prabowo sampai 2029.

Sekilas, keduanya seperti pendekar kalah perang mendatangi markas lawan sambil membawa parcel, bunga, dan kartu ucapan, "Kami tetap mendukung Bapak sampai akhir masa jabatan."

Tetapi jangan buru-buru percaya. Dalam politik, senyum tidak selalu berarti persahabatan. Kadang senyum adalah pagar betis bagi kepentingan yang belum selesai. Saya menyebutnya strategi blankon.

Blankon merupakan penutup kepala tradisional Jawa. Di depan terlihat santun dan bersahaja, di belakang tangan mengepal. Mulut mengucapkan dukungan, kepala tetap sibuk menghitung strategi. Jangan-jangan yang bekerja bukan sekadar otak, melainkan kalkulator politik bertenaga nuklir.

Mengapa Jokowi tidak langsung menjadi oposisi? Mengapa Gibran tidak mengajak pendukungnya berseberangan dengan Prabowo?

Sederhana. Berkelahi terbuka dengan presiden yang menguasai pemerintahan, Gerindra, koalisi, dan akses kekuasaan bukan seperti menantang tetangga bermain catur di warkop. Salah melangkahkan gajah, langsung diseruduk benteng, eh salah, menteri dari samping kanan. Terlempar dari papar catur.

Ada pula urusan keluarga tidak bisa diabaikan. Jokowi, ayah. Gibran, anak. Orang tua mana tidak terusik ketika anaknya tersingkir dari panggung kekuasaan? Anak dahulu didorong masuk gelanggang dengan menghalalkan segala cara, terlempar dari panggung kekuasaan. Kalau ini drama keluarga, penonton menyiapkan tisu. Kalau ini politik, penonton justru harus menyiapkan kalkulator.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Nekat! Ibu-ibu PNS Terobos Pengamanan, Cupang Leher Charly ST12

Oleh Redaksi · 15 Nov, 10.41 WIB



BANDA ACEH - Aksi nekat seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Konawe yang menerobos pengamanan lalu memeluk, mencium pipi, dan "mencupang" leher vokalis Setia Band Charly Van Houten saat konser menuai kecaman keras. Perbuatan tersebut dinilai mencoreng nama baik daerah sekaligus merusak marwah Aparatur Sipil Negara (ASN).Peristiwa terjadi pada malam Rabu, 11 November 2026, di panggung Expo Inovasi Daerah atau Desa Kabupaten Konawe, kawasan STQ Unaaha. Saat Charly Van Houten turun dari panggung untuk menyapa penonton, wanita berinisial L yang diketahui berstatus PNS nekat menerobos barisan petugas Satpol PP dan kepolisian.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat wanita berjilbab itu langsung memeluk Charly, mencium pipinya, lalu beralih mencium leher sang vokalis. Petugas keamanan segera mengamankan situasi dan berusaha melepaskan dekapan tersebut.

Pengakuan Pelaku

Dalam video pengakuan yang juga beredar, wanita tersebut menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Ia mengaku sempat berteriak "Ayang (Charly), kamu tunggu saya" sebelum menerobos pengamanan.

"Saat saya lihat dia turun dari tangga panggung dan di situ dijaga Satpol PP, saya langsung terobos dan saya peluk. Saya cium dulu pipinya, kemudian saya cium lehernya," ujarnya.

Aksi yang viral itu justru memicu reaksi beragam di media sosial. Sebagian netizen menganggapnya "beruntung", sementara yang lain mengkritik keras dan menyebut tindakan tersebut tidak pantas, apalagi dilakukan oleh ASN.

Dilaporkan ke BKPSDM Konawe

Menanggapi viralnya video tersebut, advokat asal Konawe, Agus Mundu, S.H., menyatakan akan segera melaporkan oknum PNS tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe. Laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai rencananya dilayangkan pada Senin, 14 November 2026.

Agus Mundu menilai tindakan yang terekam kamera itu telah mencoreng nama baik Kabupaten Konawe dan merusak citra ASN. Apalagi setelah aksinya viral, oknum tersebut dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan maupun rasa malu di hadapan publik.

"Perbuatan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang abdi negara yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat. Kami akan segera melaporkannya ke BKPSDM Konawe agar diproses sesuai aturan kode etik dan disiplin kepegawaian yang berlaku," tegas Agus Mundu.

Potensi Sanksi Berat

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin